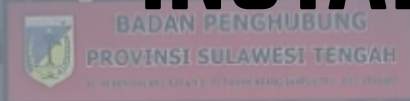


LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**Badan Penghubung Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, atas ijin-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penyusunan LKjIP Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025, sesuai amanat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKjIP merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

LKjIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai Kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*. Dalam perspektif yang lebih luas, maka LKjIP berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik. Melalui LKjIP, Badan Penghubung melaporkan kinerjanya yang diukur dari pencapaian kinerja misi, sasaran, program, dan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2025.

Dengan telah tersusunnya LKjIP Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025, maka kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu hingga selesainya penyusunan LKjIP ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pelaksana kegiatan yang sudah bekerja secara optimal dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2025.



**KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

JEMMY FISCHER, SSTP

Pembina Tingkat I

NIP: 19770104 199612 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Gambaran Umum	1
1.2 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi	4
1.3 Isu Strategis/Permasalahan	9
1.4 Tindak Lanjut Lhe Akip	10
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	12
2.1 Renstra Perangkat Daerah	12
2.2 Struktur Program Dan Kegiatan	13
2.3 Indikator Kinerja Utama	14
2.4 Perjanjian Kinerja	15
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	22
3.1 Capaian Kinerja	22
3.2 Realisasi Anggaran	30
3.3 Inovasi	32
3.4 Penghargaan	32
BAB 4 PENUTUP	33

IKHTISAR EKSEKUTIF

Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah adalah salah satu organisasi perangkat daerah di bawah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Pada tahun 2025, Badan Penghubung Daerah mengampu urusan Pelayanan Penghubung dengan sasaran strategis ‘meningkatnya pelayanan pendukung yang prima’ dan indikator kinerja utama (IKU) adalah indeks kepuasan masyarakat (IKM). Capaian skor IKM Badan Penghubung Daerah untuk tahun 2025 adalah sebesar 76,34 atau kisaran 93% dari target kinerja yang ditentukan sebesar 82. Dari sisi anggaran, Badan Penghubung Daerah mengelola pagu APBD untuk tahun 2025 sebesar Rp. 12.676.853.971 dengan total realisasi sebesar Rp. 9.658.360.989 atau kurang lebih 76,19% dari total pagi. Efisiensi sumber daya yang dicatat oleh Badan Penghubung untuk tahun 2025 adalah sebesar 16,91. Kendala utama yang dihadapi oleh Badan Penghubung Daerah untuk tahun 2025 adalah efisiensi anggaran masal di awal tahun yang berakibat pada terhambatnya pelaksanaan sejumlah pekerjaan dan berakibat pada sejumlah sub kegiatan yang mengalami realokasi karena keterbatasan waktu pelaksanaan yang tidak memungkinkan pelaksanaan pekerjaan dalam sub kegiatan tersebut. Akibat dari beberapa sub kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan maka sejumlah anggaran dari sub kegiatan tersebut dialokasikan kembali untuk mendukung capaian sub kegiatan lain serta untuk menguatkan pelaksanaan sejumlah pekerjaan di sub kegiatan teknis di bawah Program Pelayanan Penghubung.

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum

Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah merupakan Badan Daerah yang merupakan salah satu perangkat Daerah yang menyelenggarakan administrasi di bidang penghubung provinsi yang meliputi melaksanakan urusan pemerintahan bidang Promosi, Informasi Daerah, Koordinasi Urusan Pemerintahan, Pembangunan, Hubungan Antar Lembaga Pemerintah dan Pembinaan Kemasyarakatan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah dan dipertegas dengan uraian tugas dan tata kerja Lembaga Tehnis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, yang telah diubah dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah merupakan unsur penunjang Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang dipimpin oleh Kepala Kantor dengan Eselon III/a yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Sulawesi Tengah melalui Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintah dan merupakan salah satu perangkat Daerah yang menyelenggarakan administrasi di bidang penghubung provinsi yang meliputi melaksanakan urusan pemerintahan bidang Promosi, Informasi Daerah, Koordinasi Urusan Pemerintahan, Pembangunan, Hubungan Antar Lembaga Pemerintah dan Pembinaan Kemasyarakatan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Badan Daerah dan dipertegas dengan uraian tugas dan tata kerja Lembaga Tehnis Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Keberadaan Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Jakarta merupakan perpajangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang tidak terlepas dari aturan di dalamnya, serta merupakan ujung tonggak untuk kemajuan, peningkatan dan

menciptakan iklim investasi, secara tidak langsung iklim investasi tersebut dapat meningkatkan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan Provinsi Sulawesi Tengah di Jakarta sangat ditentukan oleh kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang tersedia. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah didukung oleh 72 pegawai yang terdiri atas 31 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 10 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan 31 Tenaga Honorewr/Kontrak yang bertugas sebagai Operator, Pengemudi/*driver*, dan Petugas Kebersihan.

Pegawai tersebut tersebar di tiga lokasi, yaitu:

1. Kantor Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah di Jalan Belawan No. 15, Cideng, Jakarta Pusat
2. Mess Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah di Jalan Kebon Kacang Raya No. 32, Jakarta Pusat; dan
3. Anjungan Sulawesi Tengah, Taman Mini Indonesia Indah (TMII)

Rincian pegawai pada masing-masing lokasi adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Badan Penghubung Jakarta

GOLONGAN	JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
Golongan IV	7 orang
Golongan III	19 orang
Golongan II	4 orang
Golongan I	1 orang
Jumlah	31 Orang

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Badan Penghubung Jakarta

GOLONGAN	JUMLAH PPPK
Golongan IX	4 orang
Golongan V	6 orang
Jumlah	10 Orang

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan Tingkat Pendidikan di Badan Penghubung

Tingkat Pendidikan	Jumlah PNS
SD	1 Orang
SMP	0 orang
SMA	5 Orang
D-III	1 Orang
S-1/D-4	14 Orang
S-2	10 Orang
Jumlah	31 Orang

Tabel 1.4
Jumlah PPPK berdasarkan Tingkat Pendidikan di Badan Penghubung

Tingkat Pendidikan	Jumlah PPPK
SD	0 orang
SMP	0 orang
SMA	6 Orang
S-1/D-4	4 Orang
S-2	0 Orang
Jumlah	10 Orang

Salah satu faktor yang mendukung kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah adalah ketersediaan sarana dan prasarana kerja yang memadai. Saat ini, prasarana yang digunakan oleh Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah berlokasi di Jl. Kebon Kacang Raya No. 32, Jakarta Pusat dan Mess Belawan dengan status hak pakai. Prasarana kantor yang meliputi ruang kerja pimpinan, ruang kerja staff, ruang rapat, dapur, serta mess kebon kacang yang terdiri dari 17 kamar dan juga mess belawan yang terdiri dari 14 kamar.

Daya dukung sarana penunjang operasional pemerintahan juga perlu mendapatkan perhatian, terutama pada perangkat computer atau laptop. Hal ini penting karena kelancaran dan efisiensi penyelenggaraan tugas dan fungsi, termasuk administrasi, kearsipan, perencanaan, maupun pelayanan, sangat bergantung pada dukungan perangkat computer baik dalam perangkat keras (hardware) maupun perangkat lunak (software).

Selain itu, diharapkan ke depan dapat dikembangkan system komputerisasi untuk mendukung penyelenggaraan berbagai layanan di Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah. adapapun kondisi inventaris dan perlengkapan Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah per Desember 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 1.5
Daftar dan Nilai Aset Tetap dan Aset Lainnya Badan Penghubung Tahun 2024

No.	Nama Barang	Nilai
	ASET TETAP	28.365.052.232
1.	Tanah	2.461.500.000
2.	Peralatan dan Mesin	15.798.682.613
3.	Gedung dan Bangunan	9.039.432.706
4.	Jalan, Jaringan dan Irigasi	607.094.000
5.	Aset Tetap Lainnya	458.342.913
	ASET LAINNYA	3.630.829.760

1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Badan Penghubung Provinsi Sulawesi dibantu oleh 4 (empat) bidang sebagai berikut:

1. Sub Bagian Tata Usaha

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan dan pemberian bimbingan teknis penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan. Uraian tugas sub bagian tata usaha meliputi :

- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Badan;
- b. Menghimpun Peraturan Perundang-undangan, pedoman, dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan sub bagian tata usaha;
- c. Melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan perencanaan program, umum, rumah tangga, dan kepegawaian, keuangan dan aset dengan pihak dan unit terkait;
- d. Melaksanakan penyiapan bahan dan melakukan pembinaan pelaksanaan kegiatan perencanaan program, umum persuratan, kehumasan, acara rapat/pertemuan, keprotokolan, dokumentasi, keamanan dan kebersihan, penerimaan tamu, rumah tangga, dan kepegawaian, Korpri, keuangan dan aset dengan unit kerja terkait;
- e. Melaksanakan penyiapan bahan dan memberikan pelayanan teknis administrasi perencanaan program;
- f. Melaksanakan penyiapan bahan dan memberikan pelayanan teknis pengelolaan administrasi Keuangan yang meliputi pembukuan, perbendaharaan, verifikasi, serta penyusunan data anggaran serta memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan;
- g. Melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, dan SKP
- h. Melaksanakan pengelolaan persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan hukum;
- i. Melaksanakan pengoordinasian penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Peta Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan;
- j. Melaksanakan pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimum;
- k. Melaksanakan/mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional;
- l. Melaksanakan penyiapan bahan dan pelayanan teknis kegiatan rumah tangga yang meliputi penerimaan tamu, kehumasan, kebersihan keamanan;

- m. Melaksanakan pengelolaan aset dan keuangan yang meliputi pengadministrasian, pendistribusian, dan penyusunan data inventarisasi aset, serta pembukuan, perbendaharaan, verifikasi, serta penyusunan data anggaran serta memfasilitasi tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan di lingkup badan;
- n. Melaksanakan penyusunan Lakip Badan Bina Administrasi Kewilayahan;
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- p. Menyiapkan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sub bagian tata usaha badan penghubung.

2. Sub Bidang Promosi dan Informasi Daerah

Sub Bidang Promosi dan Informasi Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan kegiatan Promosi dan Informasi Daerah.

Uraian tugas Sub Bidang Promosi dan Informasi Daerah meliputi :

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Promosi dan Informasi Daerah;
- b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Promosi dan Informasi Daerah;
- c. melaksanakan koordinasi dan bimbingan teknis Promosi dan Informasi Daerah dengan unit kerja/instansi terkait;
- d. melakukan pencatatan dan pengelolaan kegiatan-kegiatan promosi dan pelayanan informasi daerah meliputi ekonomi, sosial, budaya dan pariwisata di provinsi Sulawesi Tengah;
- e. melakukan pengumpulan data informasi mengenai kegiatan promosi dan informasi;
- f. melaksanakan kegiatan pelayanan informasi;
- g. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Seksi Promosi dan Informasi Daerah;
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- i. melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas seksi Promosi dan Informasi Daerah.

3. Sub Bidang Koordinasi Urusan Pemerintahan dan Pembangunan

Sub Bidang Koordinasi Urusan Pemerintahan dan Pembangunan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, koordinasi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait penyelenggaraan kegiatan Koordinasi Urusan Pemerintahan dan Pembangunan.

Uraian tugas Sub Bidang Koordinasi Urusan Pemerintahan dan Pembangunan meliputi :

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Koordinasi Urusan Pemerintahan dan Pembangunan;
- b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Koordinasi Urusan Pemerintahan dan Pembangunan;
- c. melaksanakan koordinasi dan bimbingan teknis Koordinasi Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan unit kerja/instansi terkait melakukan kerjasama dengan instansi terkait di pusat dan daerah dalam rangka Koordinasi Urusan Pemerintahan dan Pembangunan;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Seksi Koordinasi Urusan Pemerintahan dan Pembangunan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- f. melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas seksi Koordinasi Urusan Pemerintahan dan Pembangunan.

4. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Pemerintah dan Pembinaan Kemasyarakatan

Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Pemerintah dan Pembinaan Kemasyarakatan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan kegiatan Hubungan Antar Lembaga Pemerintah dan Pembinaan Kemasyarakatan.

Uraian tugas Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Pemerintah dan Pembinaan Kemasyarakatan meliputi :

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun program kerja Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Pemerintah dan Pembinaan Kemasyarakatan;
- b. menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Pemerintah dan Pembinaan Kemasyarakatan;
- c. melaksanakan koordinasi dan bimbingan teknis Hubungan Antar Lembaga Pemerintah dan Pembinaan Kemasyarakatan dengan unit kerja/instansi terkait;

- d. melaksanakan penyiapan bahan dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan hubungan antar lembaga pemerintah dengan instansi terkait;
- e. melakukan gubungan timbal balik dengan lembaga- lembaga pemerintah;
- f. menindaklanjuti hubungan yang telah dilakukan dengan lembaga pemerintah sesuai kebijakan gubernur;
- g. melaksanakan pengumpulan data dan menyiapkan bahan pembinaan hubungan antar lembaga perintah;
- h. menghimpun dan data informasi mengenai kegiatan lembaga pemerintah sesuai kebijakan gubernur;
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Seksi Hubungan Antar Lembaga Pemerintah dan Pembinaan Kemasyarakatan;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
- k. melaksanakan penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan bahan laporan pelaksanaan tugas seksi Hubungan Antar Lembaga Pemerintah dan Pembinaan Kemasyarakatan.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Uraian tugas, fungsi dan tata kerja kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menurut jenis dan jenjang Jabatan Fungsional.

Untuk menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di Bidang penghubung provinsi yang menjadi tugas dan fungsi Badan, disusun standar prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimal.

Standar prosedur kerja atau manual dan standar pelayanan minimal ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

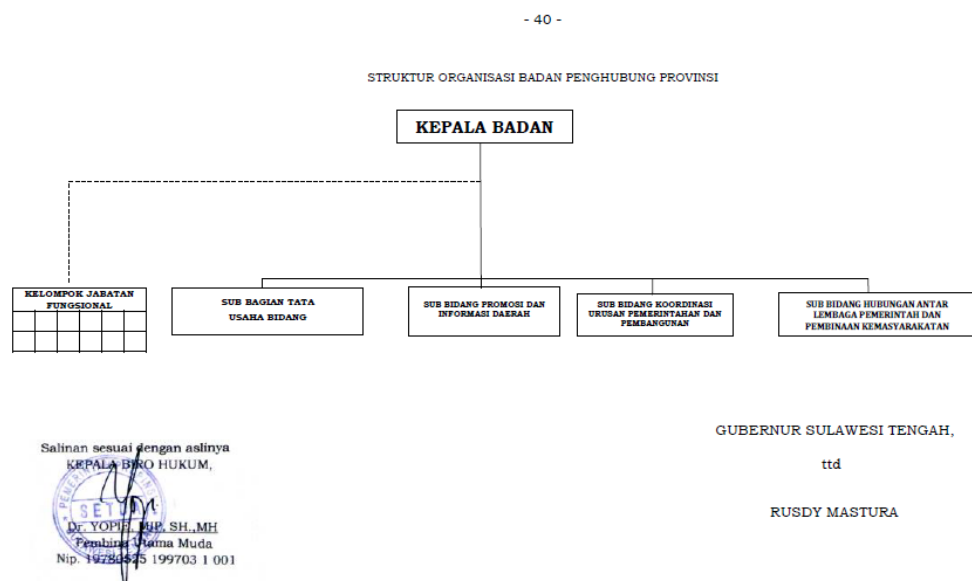
Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan Unit Organisasi dan kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dalam lingkungan masing-masing, antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah, serta dengan instansi lain diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan menerapkan asas umum penyelenggaraan Negara meliputi :

- a. asas kepastian hukum;
- b. asas tertib penyelenggaraan negara;
- c. asas kepentingan umum;
- d. asas keterbukaan ;

- e. asas proporsionalitas;
- f. asas profesionalitas; dan
- g. asas akuntabilitas.

Setiap pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Badan wajib mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta membenkan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. Dalam hal mengawasi, memimpin, mengkoordinasikan, membimbing serta memberikan petunjuk jika terjadi penyimpangan bawahan maka dilakukan tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya dengan tembusan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Adapun Struktur Organisasi Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai berikut



Gambar 1.1
Struktur Badan Penghubung Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

1.3 Isu Strategis/Permasalahan

Isu strategis merupakan kondisi atau hal penting yang harus diperhatikan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, baik yang bersumber dari lingkungan internal maupun eksternal organisasi. Isu-isu strategis tersebut antara lain:

1. Optimalisasi Peran Badan Penghubung sebagai Representasi Daerah

Badan Penghubung memiliki peran strategis sebagai perwakilan resmi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di tingkat nasional. Optimalisasi fungsi koordinasi, fasilitasi, dan komunikasi antar lembaga pusat, daerah, serta pihak terkait menjadi isu penting dalam mendukung kepentingan daerah.

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Fasilitas Daerah

Tuntutan terhadap pelayanan yang cepat, responsif, dan profesional bagi pimpinan daerah, OPD, serta masyarakat Sulawesi Tengah di luar daerah semakin meningkat, sehingga memerlukan peningkatan kualitas tata kelola pelayanan.

3. Penguatan Promosi Daerah dan Citra Provinsi Sulawesi Tengah

Badan Penghubung berperan strategis dalam mempromosikan potensi daerah, budaya, pariwisata, serta peluang investasi Sulawesi Tengah di tingkat nasional, yang membutuhkan pendekatan inovatif dan kolaboratif.

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Digitalisasi Layanan

Perkembangan teknologi informasi menuntut Badan Penghubung untuk mengadaptasi sistem kerja berbasis digital guna mendukung efektivitas koordinasi, dokumentasi, dan pelayanan informasi.

5. Penguatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM

Ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia yang profesional serta penataan kelembagaan yang efektif menjadi isu strategis dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penghubung.

Di sisi lain, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah masih menghadapi beberapa permasalahan, antara lain:

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang Kompeten

Jumlah dan kualitas SDM yang tersedia belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan organisasi, khususnya dalam bidang keprotokolan, hubungan antar lembaga, dan pengelolaan informasi.

2. Belum Optimalnya Sarana dan Prasarana Pendukung

Keterbatasan sarana prasarana, termasuk fasilitas penunjang pelayanan dan promosi daerah, berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan tugas Badan Penghubung.

3. Koordinasi Antar Perangkat Daerah yang Belum Maksimal

Masih diperlukan penguatan koordinasi dan sinkronisasi program antara Badan Penghubung dengan perangkat daerah di Provinsi Sulawesi Tengah agar pelayanan dan fasilitasi dapat berjalan lebih optimal.

4. Keterbatasan Anggaran dalam Mendukung Program Strategis

Alokasi anggaran yang terbatas menjadi kendala dalam pengembangan inovasi layanan, peningkatan kapasitas SDM, serta pelaksanaan kegiatan promosi daerah secara berkelanjutan.

5. Pemanfaatan Teknologi Informasi yang Belum Optimal

Sistem informasi dan pemanfaatan media digital dalam mendukung pelayanan dan promosi daerah masih perlu ditingkatkan agar lebih efektif dan efisien.

1.4 Tindak Lanjut LHE AKIP

Sehubungan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentang sistem Akuntabilitas Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 38 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi pemerintah Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 yaitu dalam pelaksanaan evaluasi terhadap 5 (lima) komponen akuntabilitas kinerja nilai total capaian sebesar 71,86 sehingga akuntabilitas kinerja sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh Kementerian PAN RB masuk dalam kategori BB. Hal ini menunjukkan komponen AKIP yang ada, Baik yaitu akuntabilitas kinerja sudah baik, memiliki sasaran yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan.

Sebagai tindak lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah akan melakukan perbaikan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Badan Penghubung
Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2025

No.	Rekomendasi LHE	Tindak Lanjut
1	Membuat kerangka acuan untuk kinerja yang ingin dicapai	Kerangka acuan telah disusun
2	Mendokumentasikan kegiatan pemantauan setiap triwulan secara berkala melalui Berita Acara, Daftar Hadir dan Notulensi	Dokumentasi kegiatan tersedia di sub bidang pelaksana masing-masing
3	Melakukan pemantauan atas capaian kinerja secara berjenjang	Pemantauan kinerja berjenjang dilakukan melalui aplikasi e-kinerja BKN
4	Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja	Pemanfaatan teknologi telah dilakukan salah satunya dengan SKM online yang menggunakan QR code
5	Memberikan informasi tentang keterlibatan pimpinan dalam pengambilan keputusan strategis yang didukung dengan data dukung, daftar hadir, notulensi dan dokumentasi	Keterlibatan pimpinan sudah diupayakan untuk didokumentasikan sesuai dengan kondisi di lapangan dengan menggunakan <i>tools</i> dokumentasi tertera di rekomendasi, serta dengan arsip foto dan tangkapan layar grup koordinasi melalui aplikasi IM.
6	Memastikan bahwa di dalam laporan kinerja memuat program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan capaian kinerja	Sejak LKJIP tahun 2024, telah tersedia analisis kontribusi program/kegiatan yang berdampak pada keberhasilan/kegagalan capaian kinerja
7	Menindaklanjuti hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan membuat berita acara LHE APIP sesuai peraturan perundang-undangan	Berita acara LHE APIP telah disusun

Bukti dukung untuk masing-masing tindak lanjut LHE dapat dilihat di lampiran dokumen ini.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Renstra Perangkat Daerah

Tahun 2025 adalah periode transisi dari dokumen Renstra Tahun 2021-2026 ke Renstra Tahun 2025-2029. Di bagian ini akan digambarkan kondisi tujuan, sasaran, indikator serta target Badan Penghubung Daerah pada kedua periode Renstra tersebut.

Tabel 2.1
Perbandingan Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Periode 2021-2026 dan 2025-2029

Periode Renstra	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun				
				I	II	III	IV	V
2021-2026	Meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang pendidikan, kesehatan dan perpustakaan	Meningkatnya pelayanan penghubung yang prima	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penghubung	76,61	78	80	88,5	90
2025-2029	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Meningkatnya pelayanan penghubung yang prima	Indeks kepuasan masyarakat	82	83,5	85	86,5	88

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa tidak ada perubahan signifikan dari segi sasaran dan indikator kinerja strategis Badan Penghubung selama dua periode Renstra terakhir. Perbedaan antara kedua periode tersebut adalah pada target tahunan per periode serta tujuan strategis Badan Penghubung Daerah. Pada periode sebelumnya, Badan Penghubung Daerah diposisikan sebagai OPD pelaksana pelayanan public sementara di periode terbaru Badan Penghubung diposisikan sebagai pendukung peningkatan kualitas tata Kelola dengan tetap mengadopsi fungsi pelayanan publiknya. Selain itu, target tahunan untuk periode terbaru sudah disesuaikan mengikut *trend* target tahunan periode sebelumnya, dengan mengikutsertakan masukan penyesuaian indikator program/kegiatan/sub kegiatan yang termuat dalam arsitektur kinerja yang berdampak pada reformulasi perhitungan survey kepuasan Masyarakat.

2.2 Struktur Program dan Kegiatan

Struktur program dan kegiatan beserta perubahannya untuk tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Struktur dan Perubahan Struktur Program/Kegiatan
Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	1.069.992.173	1.968.914.729	+898.922.556
1.1	PELAKSANAAN PELAYANAN PENGHUBUNG	1.069.992.173	1.968.914.729	+898.922.556
1.1.1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat	250.012.250	160.759.900	-89.252.350
1.1.2	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	324.997.860	1.451.342.366	+1.126.344.506
1.1.3	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	324.989.039	258.081.714	-66.907.325
1.1.4	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	169.993.124	98.730.749	-71.262.375
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	9.028.307.353	8.673.553.851	-304.753.702
2.1	PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	397.862.000	208.251.000	-189.611.000
2.1.1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	397.862.000	208.251.000	-189.611.000
2.2	ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	6.853.884.016	6.853.884.499	483
2.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.448.300.016	5.448.300.499	483
2.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.405.584.000	1.405.584.000	0
2.3	ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH	36.491.000	36.245.700	-245.300
2.3.1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	36.491.000	36.245.700	-245.300
2.4	ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH	59.423.799	26.293.826	-33.129.973
2.4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	59.423.799	26.293.826	-33.129.973
2.5	PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	36.470.250	250.950	-36.219.300

2.5.1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan			0
2.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	36.470.250	250.950	-36.219.300
2.6	PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	574.992.788	555.470.076	-19.522.712
2.6.1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	574.992.788	555.470.076	-19.522.712
2.7	PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	1.069.183.100	993.157.800	-76.025.300
2.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	619.933.500	549.878.000	-70.055.500
2.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	51.089.600	45.119.800	-5.969.800
2.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	398.160.000	398.160.000	0

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa peningkatan anggaran periode murni dan perubahan cukup stabil sesuai arahan dan ketentuan yang berlaku. Alokasi anggaran untuk beberapa sub kegiatan ditetapkan lebih besar dari sub kegiatan lain untuk mendorong capaian kinerja sub kegiatan yang dimaksud menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Mobilisasi anggaran ini juga dipengaruhi oleh arahan penghematan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat selama periode triwulan I dan triwulan II.

2.3 Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama (IKU) Badan Penghubung untuk periode 2021-2026 dan 2025-2029 serta target capaiannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya pelayanan Penghubung yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Badan Penghubung	Penjelasan Indeks yang menggambarkan kepuasan masyarakat atas pelayanan Badan Penghubung. Diukur menggunakan form survey kepuasan masyarakat dan dilaporkan dua kali dalam setahun. Formulasi $\frac{\sum_{i=1}^9 U_i}{9}$ U: Komponen kepuasan masyarakat	Survey Kepuasan Masyarakat Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	Kepala Badan Penghubung

IKU yang diampu oleh Badan Penghubung adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Tidak ada perubahan signifikan dari segi nomenklatur indikator kinerja utama antara periode 2021-2026 dengan 2025-2029.

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja (PK) dan PK Perubahan Kepala Badan Penghubung secara umum tidak mengalami perubahan dari sisi indikator capaian. Perubahan yang terjadi adalah di sisi anggaran, seperti rekapitulasi anggaran yang dapat dilihat di tabel 2.2 di atas. Perbandingan PK dan PK Perubahan Kepala Badan Penghubung yang lebih detil, baik dari sisi indikator maupun sisi anggaran, dapat dilihat pada gambar berikut ini:



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : JEMMY FISCHER, SSTP
Jabatan : Kepala Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

2. Nama : H. RUSDY MASTURA
Jabatan : GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Selaku atasan **Pihak Pertama**, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP)

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 30 Januari 2025

Pihak Kedua
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

H. RUSDY MASTURA

Pihak Pertama
KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

JEMMY FISCHER, SSTP
Pembina Tkt. I, IV/b
NIP. 197701041996121001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PENGHUBUNG DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

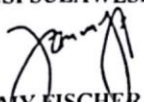
NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	STRATEGIS Meningkatnya Pelayanan Penghubung yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Penghubung	82%
2	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG Meningkatnya kualitas pelayanan hubungan antar Lembaga Meningkatnya kualitas pelayanan promosi UKM Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi pentas seni dan budaya KEGIATAN PELAKSANAAN PELAYANAN PENGHUBUNG Penjajakan komunikasi antar Lembaga yang efektif Pelaksanaan promosi UKM yang informatif Pelaksanaan fasilitasi pentas seni budaya yang atraktif	Persentase permohonan peninjauan komunikasi yang dilayani Persentase peningkatan kepuasan atas pelayanan promosi UKM Persentase peningkatan kepuasan atas pelayanan fasilitasi pentas seni dan budaya Persentase perangkat daerah yang berkoordinasi dengan Lembaga hasil peninjauan komunikasi Persentase pengunjung yang puas atas promosi UKM Persentase partisipasi pentas seni dan budaya yang puas dengan pelayanan fasilitasi	77% 77% 77% 100% 100% 100%
3	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Meningkatnya kualitas tata Kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pelayanan Penghubung KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH Meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran evaluasi dan pelaporan ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH Meningkatnya penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH Meningkatnya profesionalitas ASN Perangkat Daerah ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH Meningkatnya kualitas reformasi hukum perangkat daerah PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Meningkatnya pemanfaatan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik perangkat daerah PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN DAERAH Terwujudnya penerapan SPBE perangkat daerah PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Meningkatnya kualitas pelayanan publik perangkat daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah TLHP BPK dan APIP Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah Indeks Reformasi Hukum Perangkat Daerah Indeks Tata Kelola PBJ Perangkat Daerah Indeks SPBE Perangkat daerah Indeks Pelayanan Publik Perangkat daerah	62.56 77.44 80% 58 72 82 2.70 2.60

PROGRAM		ANGGARAN	SUMBER
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 9.028.307.353,-	APBD
2	Program Pelayanan Penghubung	Rp. 1.069.992.173,-	APBD
	Total	Rp. 10.098.299.526,-	

Palu, 30 Januari 2025

Pihak Kedua
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

H. RUSDY MASTURA

Pihak Pertama
KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

JEMMY FISCHER, SSTP
Pembina Tkt. I, IV/b
NIP. 197701041996121001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JEMMY FISCHER, SSTP
Jabatan : KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Selanjutnya disebut Pihak Pertama.

Nama : ANWAR HAFID
Jabatan : GUBERNUR SULAWESI TENGAH

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami;
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring dan Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
GUBERNUR SULAWESI TENGAH



Palu, 15 September 2025

Pihak Pertama,
KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

JEMMY FISCHER, S.STP
Pembina Tkt. I
NIP. 19770104 199612 1 001

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SULAWESI TENGAH**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	STRATEGIS Meningkatnya Pelayanan Penghubung yang Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Penghubung	82
	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG Meningkatnya kualitas pelayanan hubungan antar Lembaga Meningkatnya kualitas pelayanan promosi UKM Meningkatnya kualitas pelayanan fasilitasi pentas seni dan budaya	Persentase permohonan peninjauan komunikasi yang dilayani Persentase peningkatan kepuasan atas pelayanan promosi UKM Persentase peningkatan kepuasan atas pelayanan fasilitasi pentas seni dan budaya	77% 77% 77%
	KEGIATAN PELAKSANAAN PELAYANAN PENGHUBUNG Peninjauan komunikasi antar Lembaga yang efektif Pelaksanaan promosi UKM yang informative Pelaksanaan fasilitasi pentas seni budaya yang atraktif	Persentase perangkat daerah yang berkoordinasi dengan Lembaga hasil peninjauan komunikasi Persentase pengunjung yang puas atas promosi UKM Persentase partisipasi pentas seni dan budaya yang puas dengan pelayanan fasilitasi	100% 100% 100%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Meningkatnya kualitas tata Kelola penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pelayanan Penghubung KEGIATAN PERENCANAAN, PENGANGGARAN DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH Meningkatnya kualitas perencanaan, pengukuran evaluasi dan pelaporan ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH Meningkatnya penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH Meningkatnya profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah TLHP BPK dan APIP Perangkat Daerah Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	62.56 77.44 80% 58

ADMINISTRASI PERANGKAT DAERAH Meningkatnya kualitas reformasi hukum perangkat daerah	UMUM Persentase dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang sesuai ketentuan	100%
PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Meningkatnya pemanfaatan layanan pengadaan barang dan jasa secara elektronik perangkat daerah	Indeks Tata Kelola PBJ Perangkat Daerah	82
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN DAERAH Terwujudnya penerapan SPBE perangkat daerah	Indeks SPBE Perangkat daerah	2.70
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Meningkatnya pemeliharaan barang milik daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	100%

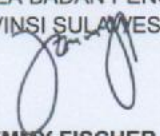
PROGRAM	ANGGARAN	KET
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 8.673.553.851,20, APBD	
2 Program Pelayanan Penghubung	Rp. 1.968.914.729,00 APBD	

Pihak Kedua,
GUBERNUR SULAWESI TENGAH


ANWAR HAFID

Palu, 16 September 2025

Pihak Pertama,
KEPALA BADAN PENGHUBUNG
PROVINSI SULAWESI TENGAH


JEMMY FISCHER, S.STP
Pembina Tkt. I
NIP. 19770104 199612 1 001

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Pembahasan capaian kinerja akan membahas capaian sesuai dokumen PK dan PK Perubahan yang mengacu pada Renstra 2021-2026 dan Renstra 2025-2029.

a. Perbandingan target, capaian dan realisasi kinerja tahun 2025

Berikut adalah perbandingan target, capaian dan realisasi kinerja tahun 2025 dengan target Renstra periode 2021-2026 dan 2025-2029:

Tabel 3.1
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Strategis
Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian (%)	
			PK	PK Perubahan		PK	PK Perubahan
1	Meningkatnya pelayanan penghubung yang prima	Indeks kepuasan masyarakat	82	82	76,34	93,10	93,10

Mengingat antara PK dan PK Perubahan tidak mengalami perubahan target capaian, maka rata-rata realisasi capaian kinerja strategis Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2025 adalah 93,10% dengan skor IKM 76,34 berdasarkan rata-rata skor Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester I dan Semester II. Capaian 93% di atas, berdasarkan Permendagri 86 Tahun 2017, termasuk dalam kategori realisasi kinerja sangat tinggi. Kategori sangat tinggi berarti realisasi kinerja telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.

b. Perbandingan target, capaian dan realisasi kinerja tahun 2023-2025

Berikut adalah perbandingan target, capaian dan realisasi kinerja untuk periode tahun 2023-2025:

Tabel 3.2
Perbandingan Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Strategis
Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Periode Tahun 2023-2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	2023			2024			2025		
			T	R	C	T	R	C	T	R	C
1	Meningkatnya pelayanan penghubung yang prima	Indeks kepuasan masyarakat	78	80,3	102	80	76,18	95,25	82	76,34	93,10

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa selama 3 tahun terakhir, Badan Penghubung secara konsisten mencatat realisasi kinerja di atas skor 91% atau masuk dalam kategori sangat tinggi. Namun demikian, terlihat pula bahwa ada kecenderungan penurunan realisasi dari tahun 2023, dengan capaian kinerja melebihi 100%, menjadi 93,10% di tahun 2025, walaupun skor IKM di 2025 tercatat mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2024 sebelumnya, yaitu dari 76,18 menjadi 76,34.

Penurunan skor pada tahun 2024 terjadi akibat adanya penggunaan formulasi baru dalam perhitungan IKM, sesuai dengan arahan untuk pemutakhiran indikator Badan Penghubung mengikuti Arsitektur Kinerja Tahun 2024. Untuk tahun 2025, formulasi yang sama juga dimanfaatkan namun ternyata target yang ditetapkan tidak dibarengi dengan peningkatan skor IKM yang juga lebih tinggi. Salah satu Kesimpulan dari fenomena ini adalah bahwa secara umum kepuasan Masyarakat terhadap Badan Penghubung pada tahun 2025 masih berada pada kondisi yang tidak jauh berbeda dengan tahun 2024, yang berarti kualitas pelayanan Badan Penghubung selama tahun 2025 masih cenderung sama dengan tahun sebelumnya.

Untuk tahun 2026, Badan Penghubung sedang mengembangkan sebuah *website* resmi yang akan difungsikan sebagai kanal resmi informasi, publikasi, pelayanan dan pengelolaan keluhan. *Website* ini diharapkan akan terintegrasi dengan form SKM Online berbasis QR yang sudah tersedia dan akan didiseminasikan secara sporadic (melalui interaksi informal pegawai dan masyarakat/pengguna layanan) serta secara strategis (sosialisasi resmi, koordinasi bersama Badan Penghubung daerah lain, publikasi cetak, dll.). Diharapkan keberadaan *website* ini akan memperkuat peran Badan Penghubung sebagai etalase daerah provinsi Sulawesi Tengah di ibukota negara, serta memberi kemudahan bagi masyarakat/pengguna layanan yang membutuhkan pelayanan yang ditawarkan oleh Badan Penghubung, tetapi tidak memiliki waktu untuk meminta layanan tersebut secara fisik.

c. *Perbandingan target, capaian dan realisasi kinerja tahun 2025 dengan Renstra*

Berikut adalah perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja tahun 2025 dengan Renstra. Sesuai arahan penyusunan LKJIP 2025, realisasi akan disandingkan capaiannya dengan target Renstra dari dua periode berbeda, yaitu Periode 2021-2026 dan Periode 2025-2029:

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Akhir Renstra 2021-2026
Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra		Tingkat Kemajuan	
				2021-2026	2025-2029	2021-2026	2025-2029
1	Meningkatnya pelayanan Penghubung yang prima	Indeks kepuasan masyarakat	76,34	90	88	84,82	86,75

Dari table di atas, realisasi 2025 tercatat memiliki Tingkat kemajuan sebesar 84,82 dibanding target akhir Renstra 2021-2026 sebesar 90. Kemajuan ini, jika dibandingkan dengan kemajuan tahun 2024 di angka 84,7, tidak terlalu signifikan dan berarti masih cukup jauh *gap* yang harus dikejar untuk dapat memenuhi skor 90 di tahun 2026.

Walaupun ketertinggalan skor yang harus dikejar cukup jauh, Pembangunan *website* resmi terpadu untuk Badan Penghubung diharapkan akan cukup untuk mendorong pemenuhan skor kepuasan masyarakat di akhir periode 2021-2026 ini. Melalui *website* terpadu tersebut, seluruh layanan, informasi dan penanganan keluhan terkait pelayanan Badan Penghubung dapat dilakukan tanpa terkendala waktu dan jarak; dua factor yang sangat menjadi pertimbangan terutama untuk wilayah DKI Jakarta yang sangat menghargai kemudahan proses pelayanan dan penanganan keluhan berbasis *online*.

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Target Akhir Renstra 2025-2029
Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Target Akhir Renstra		Tingkat Kemajuan	
				2021-2026	2025-2029	2021-2026	2025-2029
1	Meningkatnya pelayanan Penghubung yang prima	Indeks kepuasan masyarakat	76,34	90	88	84,82	86,75

Sementara, jika realisasi tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir Renstra 2025-2029, maka Tingkat kemajuan yang tercatat Adalah 86,75, dengan target akhir Renstra 2025-2029 adalah 90. Angka kemajuan ini cukup baik, mengingat untuk periode 2025-2029, tahun 2025 adalah tahun pertama pelaksanaan Renstra. Walaupun masih cukup besar *gap* yang perlu dikejar untuk memenuhi skor tersebut di 2029, periode antara dari 2026-2028 diharapkan dapat membantu mengejar pengisian *gap* tersebut.

Senada dengan di atas, Pembangunan *website* resmi terpadu Adalah langkah awal yang penting untuk mendorong peningkatan skor tersebut. Dengan *website* yang kokoh secara fundamental, beberapa kemungkinan pelayanan yang akan dikaji pengembangannya meliputi (i) layanan penyewaan kamar mess pemda secara online, (ii) layanan peminjaman mobil secara online, (iii) publikasi skor IKM dan form keluhan secara online, yang terintegrasi dengan situs *complain handling* seperti *Lapor.go.id* dan (iv) pemetaan pelaku usaha UMKM khas Sulawesi Tengah di wilayah DKI Jakarta dan Jabodetabek.

d. Perbandingan realisasi kinerja 2025 dengan standar nasional/daerah lain

Secara vertical, Badan Penghubung Daerah menjalin koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terutama Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah (Bina Bangda). Dirjen Bina Bangda juga mengampu indicator kinerja yang serupa yaitu indeks kepuasan masyarakat. Oleh karena itu, berikut Adalah perbandingan realisasi kinerja 2025 Badan Penghubung dengan Dirjen Bina Bangda:

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Dengan Realisasi Nasional Kementerian Dalam Negeri
Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2025	Realisasi Nasional	Lebih Tinggi/Lebih Rendah
1	Meningkatnya pelayanan Penghubung yang prima	Indeks kepuasan masyarakat	76,34	92.37	(16,03)

Berdasarkan table di atas, terlihat bahwa ada perbedaan skor IKM yang cukup jauh antara Badan Penghubung Daerah dengan Dirjen Bina Bangda Kemendagri, dengan Kemendagri mencatat skor IKM sebesar 92,37 pada bulan Agustus 2025, nilai yang berada di atas rata-rata nasional dan melebihi sebesar 16 poin dengan Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Perbedaan skor ini disebabkan oleh banyak factor, tetapi yang akan disorot dalam dokumen ini Adalah kemudahan akses terhadap informasi, publikasi, pelayanan serta penanganan keluhan Dirjen Bina Bangda Kemendagri yang sudah jauh lebih maju dibandingkan oleh Badan Penghubung karena satu hal: ketersediaan *website* resmi yang fungsional secara fundamental. Atas dasar ini, Badan Penghubung untuk tahun 2026 ini merencanakan untuk membangun sebuah *website* resmi yang dapat melayani fungsi yang sama dengan *website* Dirjen Bina Bangda Kemendagri.

e. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja dan alternatif Solusi

Untuk sasaran strategis yang diampu oleh Badan Penghubung yaitu ‘*meningkatnya pelayanan Penghubung yang prima*’, factor utama penghambat pencapaian kinerja tahun 2025 adalah *visibility* Badan Penghubung terhadap masyarakat umum yang bukan berasal atau memiliki relasi dengan penduduk wilayah Sulawesi Tengah. *Visibility* yang tidak maksimal ini tentu bertolak belakang dengan tugas Badan Penghubung sebagai etalase daerah provinsi Sulawesi Tengah di DKI Jakarta, dan seringkali berdampak pada tidak dijadikannya Badan Penghubung sebagai rujukan terkait informasi tentang wilayah Sulawesi Tengah, baik untuk informasi praktis (destinasi wisata, souvenir khas daerah, dll.) maupun informasi strategis (kebijakan-kebijakan daerah, relasi koordinasi

pusat-daerah-daerah lain, dll.). Kontribusi dari ketidaktahuan ini adalah minimnya pertumbuhan skor indeks kepuasan masyarakat.

Untuk mendorong peningkatan skor indeks kepuasan masyarakat yang dimaksud, Badan Penghubung menetapkan beberapa strategi sebagai berikut:

- **Pemanfaatan teknologi dalam survey**, salah satunya dengan menyediakan dokumen survey kepuasan masyarakat berbasis online memanfaatkan *Google Form* yang dapat diakses melalui HP dengan pindai kode QR berikut:



Survey Kepuasan Masyarakat

Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Gambar 3.1 QR Survey Kepuasan Masyarakat Badan Penghubung

- **Proaktif menjaring aspirasi masyarakat**, mendorong partisipasi setiap staf yang melaksanakan pelayanan (koordinasi kelembagaan, pameran, pentas seni budaya) maupun yang beraktivitas di kantor untuk mendorong keikutsertaan masyarakat pengguna layanan dalam mengisi SKM
- **Penyederhanaan birokrasi untuk sejumlah pelayanan**, salah satu yang telah diterapkan Adalah peminjaman kendaraan dinas yang kini dilakukan melalui satu operator tetap yang senantiasa hadir di *pool* mobil Mess Pemda Kebon Kacang

Berikut Adalah analisis untuk masing-masing sub bidang pelayanan

A. Sub Bidang Promosi dan Informasi

Sub Bidang Promosi dan Informasi bertugas untuk memfasilitasi pelaksanaan promosi dan informasi daerah Sulawesi Tengah ke pemerintah daerah dan organisasi-organisasi lain. Salah satu aktifitas rutin dari sub bidang ini adalah

partisipasi dalam memamerkan produk-produk khas Sulawesi Tengah di berbagai perhelatan akbar. Pameran-pameran yang diikuti mulai dari skala kecil di mall-mall local, hingga di acara besar seperti Jakarta Fair 2025.

Permasalahan utama yang dihadapi oleh sub bidang ini adalah partisipasi perhelatan seringkali terhalang oleh biaya penyewaan *booth* yang terlalu tinggi, serta adanya beberapa perhelatan yang tidak berjalan dengan



ideal akibat panitia perhelatan yang kurang memfasilitasi peserta pameran yang hadir.

Untuk tahun 2025, capaian kinerja sub bidang ini dapat dilihat dari Tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan promosi UKM. Berdasarkan hasil SKM, Tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan promosi UKM di tahun 2025 berada di 76,54. Ini menunjukkan bahwa secara umum kepuasan masyarakat atas layanan sub bidang ini cukup baik dan sesuai dengan yang diharapkan.

B. Sub Bidang Koordinasi Urusan Pemerintahan dan Pembangunan

Sub Bidang Koordinasi Urusan Pemerintahan dan Pembangunan bertugas sebagai *liaison* antara pemerintah daerah Sulawesi Tengah dengan Kementerian dan Lembaga yang berlokasi di ibu kota negara DKI Jakarta. Sub bidang ini secara rutin menerima tamu-tamu dari wilayah Sulawesi Tengah yang hendak berkorespondensi dengan Kementerian dan Lembaga di Jakarta atau sebaliknya, dan memfasilitasi tamu-tamu tersebut mulai dari urusan administrative (penyampaian undangan, penjemputan/ pengantaran) hingga teknis (pendampingan selama pertemuan).

Tantangan utama yang dihadapi oleh sub bidang ini adalah tidak semua tamu daerah, sebelum berkorespondensi, berkoordinasi terlebih dahulu dengan Badan Penghubung. Akibatnya, Badan Penghubung seringkali tidak mengetahui bahwa ada tamu daerah yang sedang beraktivitas di lingkungan DKI Jakarta dan tidak dapat melakukan fasilitasi sesuai standar untuk tamu-tamu tersebut. Sub



Bidang telah mengupayakan untuk melakukan proses jemput bola dengan secara aktif berkoordinasi dengan OPD daerah, terutama Biro-Biro di Sekretariat Daerah, untuk mendapat info mengenai jadwal dan daftar tamu yang berpotensi datang berkorespondensi di DKI Jakarta, serta memastikan bahwa proses fasilitasi korespondensi berulang didampingi dan terjadwal sebagaimana mestinya.

Untuk tahun 2025, capaian kinerja sub bidang ini tercatat memiliki Tingkat kepuasan 76,19. Nilai ini menunjukkan bahwa secara umum, Tingkat kepuasan pengguna layanan (tamu daerah, tamu K/L) cukup baik dan bahkan melebihi yang diharapkan di tahun 2024 ini. Dengan penguatan dari sisi koordinasi pembuka sebelum korespondensi antar tamu, capaian kinerja ini tentu dapat lebih ditingkatkan lagi di tahun-tahun berikutnya.

C. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Bina Masyarakat



Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Bina Masyarakat bertugas untuk membangun relasi sosial yang baik antara Badan Penghubung dengan masyarakat di wilayah DKI Jakarta, terutama masyarakat yang merupakan perantau dari

wilayah Sulawesi Tengah. Sub Bidang ini secara rutin berpartisipasi dalam memfasilitasi aktivitas-aktivitas sosial perantau Sulawesi Tengah di wilayah DKI Jakarta, serta mengelola aktivitas seni budaya di Anjungan Sulawesi Tengah di Taman Mini Indonesia Indah maupun daerah lainnya di Jabodetabek dan pulau Jawa.

Tantangan utama dari sub bidang ini dari segi penjalinan relasi masyarakat adalah masih belum adanya semacam *database* komprehensif mengenai perantau-perantau dari wilayah Sulawesi Tengah di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya serta status menetapnya (menetap sementara atau menetap penuh). Dari segi pelaksanaan pentas seni, sub bidang ini menghadapi masalah yang mirip dengan sub bidang promosi dan informasi yaitu tidak semua kegiatan pentas seni budaya dapat diikuti akibat keterbatasan anggaran. Sub bidang ini juga menghadapi isu yang sama dengan bidang koordinasi pemerintahan, yaitu tidak semua peserta pentas seni, terutama yang berangkat langsung dari wilayah Sulawesi Tengah, melakukan korespondensi dengan sub bidang ini.

Untuk Tahun 2024, sub bidang ini mencatat capaian kinerja sebesar 76,25. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum kepuasan atas kinerja sub bidang ini juga cukup baik, terlepas dari beberapa tantangan yang dihadapi. Komunikasi proaktif dengan peserta pentas seni dan penguatan relasi sosial dengan masyarakat tentu akan dapat semakin meningkatkan capaian kinerja sub bidang ini ke depannya.

f. Analisis atas efisiensi sumber daya

Berikut Adalah table yang memuat perhitungan efisiensi sumber daya Badan Penghubung Daerah selama tahun 2025

Tabel 3.5
Perhitungan Efisiensi Sumber Daya Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
			T	R	K	T	R	K	
1	Meningkatnya pelayanan penghubung yang prima	Indeks kepuasan masyarakat	82	76,34	93,10	12.676.853.971	9.658.360.989	76,19	16,91

Pada tabel di atas, terlihat bahwa Badan Penghubung Daerah mencatatkan Tingkat efisiensi sebesar 16,91, atau Tingkat capaian kinerja sebesar 93% dengan memanfaatkan 76% anggaran. Efisiensi ini berarti Badan Penghubung Daerah dapat mencapai target kinerja yang ditetapkan dengan anggaran yang lebih sedikit dari yang dialokasikan.

Efisiensi ini secara kolektif dimungkinkan karena beberapa factor. Pertama adalah persepsi positif pelayanan Badan Penghubung Daerah. Berdasarkan hasil SKM Badan Penghubung tahun 2024, Tingkat kepuasan untuk semua komponen SKM (yang merupakan adaptasi dari jenis layanan yang disediakan di Badan Penghubung Daerah), Tingkat kepuasan Masyarakat seluruhnya berada di atas target yaitu lebih dari skor 75. Kedua adalah sinergi kerja antar sub bidang yang baik. Dalam hal ini, setiap sub bidang dapat secara proaktif berkomunikasi dengan sub bagian tata usaha dalam mencari tahu apa-apa saja yang perlu mereka siapkan terkait pelaksanaan acara mereka. Sub bagian tata usaha, sebagai yang bertanggung jawab dengan pengelolaan internal Badan Penghubung Daerah termasuk penyusunan peraturan dan pengelolaan hasil SKM, mendapatkan informasi cepat dengan pola koordinasi seperti ini sehingga persiapan untuk dokumentasi, penyebaran survei, penyiapan kendaraan transportasi dan lain-lain dapat dilakukan sesegera mungkin. Di sisi lain, masing-masing sub bidang juga saling berkoordinasi dengan untuk dapat saling bertukar informasi penting terkait kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing sub bidang.

g. Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program dan kegiatan yang mendukung pencapaian ditampilkan pada table berikut:

Tabel 3.6
Rekapitulasi Target, Realisasi dan Capaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2025

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target		Realisasi		Capaian	
					Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	MENINGKATNYA PELAYANAN PENGHUBUNG YANG PRIMA	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	indeks	62,56	9.857.923.625		6.843.908.891		69,43
2	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	%	77	410.419.000		410.267.891		99,96

3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian IKU PD	laporan	1	410.419.000	1,00	410.267.891	100,00	99,96
4	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase TLHP BPK dan APIP yang diselesaikan sesuai ketentuan	%	80	7.180.877.901		4.219.777.635	0,00	58,76
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase dokumen pengusulan gaji dan tunjangan yang ditindaklanjuti menjadi SPM	%	100	5.957.685.101	100,00	3.015.380.197	100,00	50,61
6	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase Dokumen Pertanggungjawaban yang diverifikasi dan ditindaklanjuti menjadi SPM	%	100	1.223.192.800	100,00	1.204.397.438	100,00	98,46
7	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah	indeks	58	-		-	0,00	0,00
8	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah ASN yang mendapat pembinaan internalisasi core values ASN BerAKHLAK	orang	10	-		-	0,00	0,00
9	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah yang sesuai ketentuan	%	72	39.858.668	100,00	39.605.655	138,89	99,37
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dokumen arsitektur SPBE dan Roadmap Penerapan SPBE yang tersusun	dokumen	1	39.858.668	1,00	39.605.655	100,00	99,37
11	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Tata Kelola PBJ Perangkat Daerah	indeks	82	21.234.000		21.201.000	0,00	99,84
12	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				-		-	-	0,00
13	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah laporan Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang dimanfaatkan	laporan	1	21.234.000	1,00	21.201.000	100,00	99,84
14	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Indeks SPBE Perangkat Daerah	indeks	2,70	693.283.056		668.654.129	0,00	96,45
15	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jenis layanan yang diukur dengan SKM	layanan	1	693.283.056	3	668.654.129	300,00	96,45
16	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah yang dipelihara	persen	100,00	1.512.251.000	100	1.484.402.581	100,00	98,16
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	57	938.321.000	57	910.752.581	100,00	97,06
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kantor dan Mesin lainnya yang dipelihara	unit	51	45.770.000	51	45.615.000	100,00	99,66
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara	unit	3	528.160.000	3	528.035.000	100,00	99,98
20	Program Pelayanan Penghubung	Persentase permohonan peninjauan komunikasi yang dilayani	%	77	2.818.930.346	76,19	2.814.452.098	98,94	99,84
		Persentase peningkatan kepuasan atas pelayanan promosi UKM	%	77		76,54		99,40	
		Persentase peningkatan kepuasan atas pelayanan fasilitasi pentas seni dan budaya	%	77		76,25		99,03	
21	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Persentase perangkat daerah yang berkoordinasi dengan lembaga hasil peninjauan komunikasi	%	100	2.818.930.346	100	2.814.452.098	100,00	99,84

		Persentase pengunjung yang puas atas promosi UKM	%	100		100		100,00	
		Persentase partisipan seni pentas seni dan budaya yang puas dengan pelayanan fasilitas	%	100		100		100,00	
22	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat	Persentase permohonan informasi publik yang terlayani	%	100	175.507.000	100	174.815.800	100,00	99,61
23	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Persentase permohonan koordinasi antar Lembaga yang terlayani	%	100	2.151.363.150	100	2.150.288.998	100,00	99,95
24	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah kegiatan pameran UKM dan pentas seni yang difasilitasi	jumlah pameran/ pentas seni	10	358.074.347	10	356.656.220	100,00	99,60
25	Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Persentase umpan balik yang diterima untuk kegiatan pameran dan pentas seni/budaya	%	100	133.985.849	100	132.691.080	100,00	99,03

Terlihat pada table di atas bahwa hampir seluruh sub kegiatan mencatat realisasi kinerja dan anggaran di atas 95%. Untuk sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, walaupun realisasi kinerja tercatat di 100%, realisasi anggaran tercatat hanya di kisaran 50% akibat dari mobilisasi sejumlah pegawai Badan Penghubung, baik yang mengalami mutasi, promosi maupun pension. Selain itu, ada juga sejumlah pegawai yang tidak terbayarkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dengan nominal penuh akibat kendala kedisiplinan pegawai masing-masing. Terakhir, ada dua sub kegiatan yang mencatat realisasi kinerja nol tetapi masih terlampir di rekapitulasi sub kegiatan karena kedua sub kegiatan tersebut mengalami pergeseran anggaran di penghujung tahun 2025.

Berdasarkan table di atas, dapat kita lihat bahwa secara umum kinerja masing-masing sub kegiatan tergolong baik. Seluruh sub kegiatan teknis di bawah Program Pelayanan Penghubung pun mencatat realisasi 99%, namun skor tersebut masih belum cukup untuk mendorong capaian kepuasan masyarakat di angka 82. Perlu didorong agar capaian dari masing-masing sub kegiatan dapat melebihi target dan mendekati angka IKM yang telah ditetapkan di tahun-tahun berikutnya

3.2 Realisasi Anggaran

Berikut Adalah rekapitulasi anggaran tahun 2025 yang dikelola Badan Penghubung:

Tabel 3.7
Rekapitulasi Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2025

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Realisasi (%)
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	9.857.923.625	6.843.908.891	69,43
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	410.419.000	410.267.891	99,96
	<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i>	410.419.000	410.267.891	99,96
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7.180.877.901	4.219.777.635	58,76
	<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	5.957.685.101	3.015.380.197	50,61
	<i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	1.223.192.800	1.204.397.438	98,46
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	0	0	0,00
	<i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan</i>	0	0	0,00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	39.858.668	39.605.655	99,37
	<i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	39.858.668	39.605.655	99,37
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	21234000	21201000	99,84
	<i>Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan</i>	0	0	0,00
	<i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	21234000	21201000	99,84
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	693.283.056	668.654.129	96,45
	<i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	693.283.056	668.654.129	96,45
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.512.251.000	1.484.402.581	98,16
	<i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i>	938.321.000	910.752.581	97,06
	<i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	45.770.000	45.615.000	99,66
	<i>Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	528.160.000	528.035.000	99,98

	Program Pelayanan Penghubung	2.818.930.346	2.814.452.098	99,84
8	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	2.818.930.346	2.814.452.098	99,84
	<i>Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat</i>	175.507.000	174.815.800	99,61
	<i>Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat</i>	2.151.363.150	2.150.288.998	99,95
	<i>Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya</i>	358.074.347	356.656.220	99,60
	<i>Kegiatan Fasilitas Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya</i>	133.985.849	132.691.080	99,03
Total/Rata-Rata %		12.676.853.971	9.658.360.989	76,19

Terlihat pada table di atas bahwa realisasi anggaran hampir seluruh sub kegiatan berada di atas 95%. Realisasi anggaran terendah ada pada sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar 50%. Dua sub kegiatan yaitu Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan dan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan mengalami realokasi anggaran di penghujung 2025 sehingga tidak dilaksanakan di tahun tersebut.

Realisasi sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang rendah disebabkan oleh beberapa factor antara lain:

- Mobilisasi pegawai di lingkup Badan Penghubung Daerah, baik secara horizontal/vertical maupun eksternal yang berdampak pada pembayaran nominal sejumlah gaji dan tunjangan
- Pemotongan kedisiplinan untuk sejumlah pegawai yang menghadapi isu kedisiplinan

3.3 Inovasi

Untuk tahun 2025, Badan Penghubung Daerah Provinsi tidak mengembangkan sebuah inovasi capaian kinerja yang spesifik.

3.4 Penghargaan

Untuk tahun 2025, Badan Penghubung Daerah Provinsi tidak mendapatkan penghargaan spesifik terkait kinerja maupun inovasi kinerja.

BAB 4

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka berikut beberapa kesimpulan yang dapat ditarik terkait kinerja Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025 ini:

- Badan Penghubung Daerah Sulawesi Tengah mencatat capaian kinerja tahun 2025 sebesar 93,10%, dengan realisasi sebesar 76,19% dan total efisiensi sebesar 16,91 jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Capaian kinerja ini masih berada di kisaran 86,8% jika dibandingkan dengan target Renstra tahun 2029 dan mengalami peningkatan tipis dari skor IKM murni tetapi penurunan capaian kinerja dibandingkan tahun 2024 yang mencatat capaian sebesar 95%
- Capaian Program Pelayanan Penghubung dan Kegiatan Pelayanan Penghubung tahun 2024 berada di atas target yang telah ditetapkan (> 77) tetapi tidak mencapai skor yang cukup (≥ 82) untuk dapat mencatat capaian kinerja 100%.
- Capaian Kinerja Program Penunjang Urusan Daerah cukup baik jika dilihat dari capaian indikator sub kegiatan, tetapi capaian indikator program dan kegiatan belum dapat ditampilkan karena masih menunggu rilis resmi dari OPD yang berwenang menghitung skor capaian masing-masing.
- Realisasi kumulatif tercatat sebesar 76,19%, dengan realisasi individual Program Penunjang dan Program Pelayanan Penghubung masing-masing sebesar 69,43% dan 99,84%.
- Anggaran yang tersedia terbukti mampu untuk memenuhi target-target yang ditentukan, namun demikian perlu pertimbangan untuk melakukan reformulasi indikator untuk beberapa target agar indikator yang ada dapat lebih representative dengan kondisi lapangan
- Pencatatan pelaksanaan aktivitas, terutama terkait yang berhubungan langsung dengan Masyarakat, perlu ditingkatkan

Untuk langkah di tahun selanjutnya, Badan Penghubung telah menyiapkan beberapa langkah strategis dan praktis untuk memastikan capaian kinerja yang lebih baik dari tahun 2025, yaitu:

- **Kalkulasi dan kalibrasi ulang sejumlah indikator capaian kinerja** untuk memastikan bahwa masing-masing indikator kinerja dapat berkontribusi maksimal untuk indikator lain dan merepresentasikan kinerja dengan lebih komprehensif

- **Penguatan sinergi antar subbidang** untuk menghilangkan ego sektoral yang dapat berdampak negatif ke kinerja Badan Penghubung secara keseluruhan
- **Penguatan pengarsipan dan digitalisasi arsip sederhana** untuk memastikan bahwa dokumen-dokumen penting terkait administrasi Badan Penghubung aman tersimpan di *cloud storage* sederhana dan dapat diakses oleh siapapun staf Badan Penghubung yang memiliki akses
- **Pelaksanaan monitoring kinerja** untuk memastikan bahwa capaian kinerja masing-masing sub bidang termonevitor secara berkala dan dapat dianalisis penyebab dan strategi percepatan jika diperlukan
- **Pendekatan dokumentasi multimoda** untuk memastikan bahwa dokumentasi pelaksanaan kegiatan dapat tersedia dalam berbagai bentuk cetak maupun digital (foto, video, klip pendek, animasi, rekaman suara, dll.)
- **Evaluasi standar pelayanan dan standar operasional prosedur** untuk memastikan pelayanan yang disediakan oleh Badan Penghubung senantiasa memenuhi standar yang diharuskan.



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **NURHIKMAWATI, SH, M.A**
Jabatan : Kepala Sub Bidang Promosi dan Informasi Daerah

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

2. Nama : **JEMMY FISCHER, SSTP**
Jabatan : Kepala Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

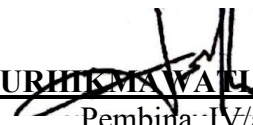
Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP)

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 22 September 2025

Pihak Pertama
**KEPALA SUB BIDANG
PROMOSI DAN INFORMASI**


NURHIKMAWATI, SH, MA
Pembina, IV/a
NIP. 19740118 199903 2 011

Pihak Kedua
**KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

JEMMY FISCHER, SSTP
Pembina Tkt. I, IV/b
NIP. 19770104 199612 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya Terlaksananya peningkatan fasilitas promosi produk unggulan dan pelestarian seni budaya	Persentase umpan balik yang diterima untuk kegiatan pameran dan pentas seni budaya	100%

KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung <i>Peningkatan Fasilitas Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya</i>	Rp. 258.081.714,- Rp. 258.081.714,-	APBD

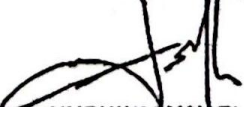


Pihak Kedua
**KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

JEMMY FISCHER, SSTP
Pembina Tkt. I, IV/b
NIP. 19770104 199612 1 001

Palu, 22 September 2025

Pihak Pertama
**KEPALA SUB BIDANG
PROMOSI DAN INFORMASI**


NURHIKMAWATI, SH, MA
Pembina, IV/a
NIP. 19740118 199903 2 011



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **YENNY HEROWATI, SE, M.Si**
Jabatan : Kepala Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Dan Pembinaan Masyarakat
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
2. Nama : **JEMMY FISCHER, SSTP**
Jabatan : Kepala Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP)

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 22 September 2025

Pihak Kedua
**KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

JEMMY FISCHER, SSTP
Pembina Tkt. I, IV/b
NIP. 19770104 199612 1 001

Pihak Pertama
**KEPALA SUB BIDANG
HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
DAN BINA MASYARAKAT**

YENNY HEROWATI, SE, M.Si.
Pembina, IV/a
NIP. 19680720 200212 2 002

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat Terlaksananya peningkatan kualitas layanan public bagi aparatur dan Masyarakat	Persentase permohonan informasi public yang terlayani	100%
2	Kegiatan Fasilitasi Pameran Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya Terlaksananya kegiatan pelayanan fasilitasi pameran produk unggulan dan pelestarian seni budaya	Jumlah kegiatan pameran UKM dan pentas seni yang difasilitasi	100%

KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Rp. 260.490.649,-	APBD
	<i>Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bagi Aparatur dan Masyarakat</i>	Rp. 160.759.900,-	
	<i>Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya</i>	Rp. 98.730.749,-	

Palu, 22 September 2025



Pihak Kedua
**KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**


JEMMY FISCHER, SSTP
Pembina Tkt. I, IV/b
NIP. 19770104 199612 1 001

Pihak Pertama
**KEPALA SUB BIDANG
HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
DAN BINA MASYARAKAT**


YENNY HEROWATI, SE, M.Si.
Pembina, IV/a
NIP. 19680720 200212 2 002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **NOVIVA DEBBY SUMAMPOUW, S.Sos, M.A**
Jabatan : Kepala Sub Bidang Koordinasi Urusan Pemerintahan Dan Pembangunan
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
2. Nama : **JEMMY FISCHER, SSTP**
Jabatan : Kepala Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

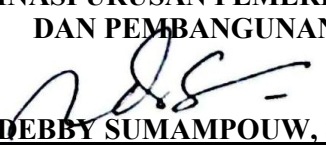
1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP)

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 22 September 2025

Pihak Kedua
**KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

JEMMY FISCHER, SSTP
Pembina Tkt. I, IV/b
NIP. 19770104 199612 1 001

Pihak Pertama
**KEPALA SUB BIDANG
KOORDINASI URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PEMBANGUNAN**

NOVIVA DEBBY SUMAMPOUW, S.Sos., M.A.
Pembina, IV/a
NIP. 19760305 200501 2 013

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat Terlaksananya pelayanan kelembagaan aparatur dan masyarakat	Persentase permohonan koordinasi antar Lembaga yang terlayani	100%

KEGIATAN/SUB KEGIATAN		ANGGARAN	KETERANGAN
1	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Rp. 1.451.342.366,-	APBD
	<i>Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat</i>	Rp. 1.451.342.366,-	

Pihak Kedua
**KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

JEMMY FISCHER, SSTP
Pembina Tkt. I, IV/b
NIP. 19770104 199612 1 001

Palu, 22 September 2025
Pihak Pertama
**KEPALA SUB BIDANG
KOORDINASI URUSAN PEMERINTAHAN
DAN PEMBANGUNAN**

NOVIVA DEBBY SUMAMPOUW, S.Sos., M.A.
Pembina, IV/a
NIP. 19760305 200501 2 013



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **IKA RAHMAWATI P., SP. M.Si.**

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

2. Nama : **JEMMY FISCHER, SSTP**

Jabatan : Kepala Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP)

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 22 September 2025

Pihak Kedua
**KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

JEMMY FISCHER, SSTP
Pembina Tkt. L/IV/b
NIP. 19770104 199612 1 001

Pihak Pertama
**KEPALA SUB BAGIAN
TATA USAHA**

IKA RAHMAWATI P, SP, M.Si.
Pembina, IV/a
NIP. 19740109 200212 2 007

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD Tersusunnya dokumen capaian IKU perangkat daerah	Jumlah laporan capaian IKU PD	1 Laporan
2.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Terdistribusinya pembayaran gaji, tunjangan dan TPP Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Terverifikasinya dokumen pertanggungjawaban	Persentase dokumen pengusulan gaji dan tunjangan yang ditindaklanjuti menjadi SPM Persentase dokumen pertanggungjawaban yang diverifikasi dan ditindaklanjuti menjadi SPM	100% 100%
3.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Terbina dan terbimbingnya ASN tentang teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Terbinanya ASN tentang internalisasi core values ASN BerAKHLAK	10 orang
4.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersusunnya dokumen arsitektur SPBE dan Roadmap Penerapan SPBE Perangkat Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE dan Roadmap Penerapan SPBE Perangkat Daerah	1 dokumen
5.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Termanfaatkannya Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah laporan pemanfaatan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1 laporan
6.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Terukurnya SKM pada layanan perangkat daerah	Jumlah jenis layanan yang diukur dengan SKM	1 Layanan
7.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional atau lapangan serta dibayarkan pajak dan perizinannya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Terpeliharanya peralatan kantor dan mesin lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Terpeliharanya sarana dan prasarana Gedung kantor	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya Jumlah Peralatan kantor dan Mesin lainnya yang dipelihara Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang dipelihara	55 unit 51 unit 3 unit

	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	KETERANGAN
1	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah <i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja SKPD</i>	Rp. 208.251.000,- Rp. 208.251.000,-	APBD
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah <i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i> <i>Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i>	Rp. 6.853.884.499,- Rp. 5.448.300.499,- Rp. 1.405.584.000,-	APBD
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah <i>Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan</i>	Rp. 36.245.700,- Rp. 36.245.700,-	APBD
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah <i>Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	Rp. 26.293.826.- Rp. 26.293.826,-	APBD
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <i>Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i>	Rp. 250.950,- Rp. 250.950,-	APBD
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <i>Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor</i>	Rp. 555.470.076,- Rp. 555.470.076,-	APBD
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah <i>Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan</i> <i>Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya</i> <i>Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya</i>	Rp. 993.157.800,- Rp. 549.878.000,- Rp. 45.119.800,- Rp. 398.160.000,-	APBD

Palu, 22 September 2025



Pihak Kedua

KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH

PROVINSI SULAWESI TENGAH

JEMMY FISCHER, SSTP

Pembina Tkt. I, IV/b

NIP. 19770104 199612 1 001

Pihak Pertama

KEPALA SUB BAGIAN

TATA USAHA

IKA RAHMAWATI P, SP, M.Si.

Pembina, IV/a

NIP. 19740109 200212 2 007

Lampiran I

Bukti Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP 2025

Rekomendasi 1 Membuat Kerangka Acuan Untuk Kinerja Yang Ingin Dicapai

KAK

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (KAK)

Menarik Investasi, Wisatawan, Melestarikan Budaya, dan Memperkuat Ekonomi Lokal

1. Latar Belakang

Dalam rangka upaya menarik investasi, meningkatkan kunjungan wisatawan, melestarikan budaya dan produk lokal, serta mendorong pertumbuhan ekonomi adalah karena sektor pariwisata dan produk unggulan terbukti mampu menjadi motor penggerak perekonomian yang menyediakan pendapatan devisa, menciptakan lapangan kerja, dan merangsang pertumbuhan berbagai industri terkait, yang pada akhirnya menumbuhkan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah. Sebagai wujud komitmen, dilakukan kegiatan promosi yang terarah untuk menarik investasi, meningkatkan kunjungan wisatawan, melestarikan budaya, dan menggerakkan ekonomi lokal demi kesejahteraan Masyarakat.

2. Dasar Hukum

1. **Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009** adalah hukum di Indonesia yang mengatur segala aspek kepariwisataan, mulai dari hak dan kewajiban wisatawan dan pengusaha, hingga peran pemerintah dalam pembangunan dan perlindungan pariwisata yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.
2. **Pergub Sulteng No. 35 Tahun 2016**: Merupakan salah satu pedoman pelaksanaan kegiatan promosi di Sulawesi Tengah yang mengatur lebih lanjut tentang tata kelola pariwisata dan promosi daerah.
3. **Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah No. 08 Tahun 2016**: Menjadi acuan spesifik di tingkat daerah untuk kegiatan promosi, dan sesuai dengan tugas yang diatur dalam Peraturan Gubernur.

3. Maksud dan Tujuan

Maksud:

untuk menyebarkan informasi dan membujuk masyarakat untuk tertarik pada potensi, produk, dan layanan daerah, sehingga dapat meningkatkan investasi, penjualan, kesadaran, citra positif, dan kunjungan wisatawan untuk kemajuan daerah tersebut.

Tujuan:

menginformasikan potensi daerah (seperti wisata, investasi, UMKM), membujuk minat calon investor dan wisatawan, meningkatkan penjualan produk lokal, serta membangun citra dan reputasi daerah.

4. Sasaran Kegiatan

Sasaran kegiatan promosi dan informasi daerah meliputi wisatawan, investor potensial, konsumen, masyarakat umum, dan pihak terkait untuk meningkatkan kesadaran, kunjungan, investasi, penjualan produk daerah, serta memelihara citra positif dan loyalitas pelanggan.

5. Output dan Outcome

Output:

Peningkatan Jumlah Kunjungan: Meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah setelah melakukan kegiatan promosi.

Penarikan Investasi: Jumlah investasi yang masuk ke daerah tersebut meningkat karena tertarik oleh potensi yang dipromosikan.

Peningkatan Ekonomi Lokal: Pertumbuhan ekonomi lokal akibat meningkatnya aktivitas perdagangan, pariwisata, dan investasi.

Peningkatan Kesadaran dan Citra Daerah: Meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat luas mengenai keunggulan dan potensi daerah tersebut, yang berdampak pada perbaikan citra positif.

Pengembangan Materi Promosi: Pembuatan dan distribusi materi promosi seperti brosur, leaflet, video, situs web, dan presentasi yang efektif.

Pelaksanaan Acara Promosi: Terselenggaranya kegiatan seperti pameran untuk menampilkan produk unggulan daerah, kerajinan, dan potensi pariwisata

Outcome (kuantitatif):

Peningkatan Jumlah Wisatawan:

Ini adalah hasil langsung dari promosi yang efektif dalam menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke suatu daerah.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB):

Kenaikan jumlah wisatawan dan aktivitas ekonomi lainnya akan berkontribusi pada peningkatan pendapatan daerah.

Peningkatan Penjualan Produk Lokal:

Promosi yang baik akan mendorong masyarakat dan wisatawan untuk membeli produk-produk khas daerah tersebut, yang diukur dari peningkatan omzet UMKM atau pedagang lokal.

Peningkatan Jumlah Investasi:

Informasi yang baik mengenai potensi daerah bisa menarik investor untuk menanamkan modal, yang diukur dari jumlah proyek investasi baru yang masuk.

6. Lokasi dan Waktu

- Tempat: Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur dan Jakarta
- Waktu: 4 Hari pada Bulan Maret, April, Mei dan Juni
- Jadwal: Akan disesuaikan dengan kalender kegiatan

7. Kebutuhan Personil Penyelenggara

Untuk mendukung kelancaran kegiatan, dibutuhkan personil penyelenggara sebagai berikut:

1. **Penanggung Jawab:** Kepala Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah.
2. **Koordinator Kegiatan:** Kepala Sub Bidang Promosi dan Informasi
3. **Pelaksana :** Staff Subbid Promosi dan Informasi

8. Metode Pelaksanaan

- Menyediakan Stand Pameran dan Dekorasi.
- Menggelar Pagelaran Seni dan Budaya.
- Mengundang Influencer untuk mempromosikan Produk Unggulan daerah dan Kuliner Khas Daerah Sulawesi Tengah melalui media Sosial

9. Rincian Anggaran (Rp 390.625.820)

No	Uraian	Jumlah (Rp)
1	BBM	20.925.000
2	Produk bahan Pameran	10.000.000,
3	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	4.960.850
4	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	15.051.970
5	Belanja Makanan dan Minuman	131.250.000
6	Belanja Makanan dan Minuman lapangan	6.500.000
7	Belanja Jasa Tenaga Kesenian pemusik	3.000.000
8	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	5.600.000
9	Belanja Jasa Tenaga Ahli Penari	4.000.000
10	Belanja Jasa Sewa Kendaraan	500.000
11	Belanja Jasa Sewa Kendaraan bus	5.000.000
12	Dekorasi dan Stand Pameran	150.000.000
13	Belanja Perjalanan Dinas	33.838.000
	Total	390.625.820

10. Penutup

Dengan terselenggaranya kegiatan promosi dan informasi ini, diharapkan kinerja promosi Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Tengah dalam pengelolaan keuangan dapat semakin meningkat. Hal ini sekaligus mendorong tata Kelola dana promosi yang lebih akuntabel, transparan, serta mendukung pencapaian tujuan promosi Provinsi Sulawesi Tengah.

**KEPALA BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**


JEMMY FISCHER, SSTP
Pembina Tingkat I
NIP. 19770104 199612 1 001

Rekomendasi 2 Mendokumentasikan Kegiatan Pemantauan Setiap Triwulan Secara Berkala Melalui Berita Acara, Daftar Hadir dan Notulen

Absensi pemantauan berkala triwulanan



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN PENGHUBUNG

Jalan Kebon Kacang Raya No. 32 Telp. (021) 3906402
Fax. (021) 3924959 Kode Pos 10240 Email : perwakilansulteng@gmail.com
Jalan Belawan No. 15, Cideng Telp. (021) 3506116
JAKARTA

DAFTAR HADIR
RAPAT EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA TRIWULAN II
Tanggal 12 Juli 2024

No.	Nama	Tugas	Paraf
1	JEMMY FISCHER, S.STP	KEPALA BADAN PENGHUBUNG SULAWESI	1. <i>JF</i>
2	IKA RAHMAWATI P, SP., M.Si	KASUBAG TATA USAHA	2. <i>A</i>
3	NURHIKMAWATI, S.H., MA	KASUBID PROMOSI DAN INFORMASI DAERAH	3. <i>N</i>
4	YENNY HEROWATI, SE., M.Si	KASUBID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN PEMBINA KEMASYARAKATAN	4. <i>Y</i>
5	NOVIVA DEBBY SUMAMPOUW, S.Sos., MA	KASUBID KORDINASI URUSAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN	5. <i>N</i>
6	HERLINA MONDARFA, S.AP	STAFF	6. <i>HM</i>
7	MARTHA PUTRI NINGSIH, S.Sos	STAFF	7. <i>MPN</i>
8	JUSAK TOMMY, S.Kom., MM	STAFF	8. <i>JT</i>
9	NUR SADOAH, SE., MM	STAFF	9. <i>NS</i>
10	UWEYS ALQORNEY, ST	STAFF	10. <i>U</i>
11	MASYITHA AGLINA, S.Sos	STAFF	11. <i>MA</i>
12	drg. NINUK AFIATI	STAFF	12. <i>NA</i>
13	RUSTIYANI LAPASIRI, SH	STAFF	13. <i>R</i>
14	AMRILLA HASINMANA, Amd.kep	STAFF	14. <i>A</i>
15	RANDIE ANANDA AGAM, SKM	STAFF	15. <i>R</i>
16	NORA, SE	STAFF	16. <i>N</i>
17	HAMDAN TEGELA	STAFF	17. <i>H</i>
18	WINDY WIDYANINGSIH KABI, SE., MA	STAFF	18. <i>W</i>
19	REZA PAHLEVI	STAFF	19. <i>R</i>

Mengetahui,
Kasubag Tata Usaha

IKA RAHMAWATI P, SP., M.Si
NIP. 19740109 200212 2 007



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN PENGHUBUNG

Jalan Kebon Kacang Raya No. 32 Telp. (021) 3906402
Fax. (021) 3924959 Kode Pos 10240 Email : perwakilansulteng@gmail.com
Jalan Belawan No. 15, Cideng Telp. (021) 3506116
JAKARTA

DAFTAR HADIR
RAPAT EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA TRIWULAN III
Tanggal 11 Oktober 2024

No.	Nama	Tugas	Paraf
1	JEMMY FISCHER, S.STP	KEPALA BADAN PENGHUBUNG SULAWESI	1. <i>JF</i>
2	IKA RAHMAWATI P, SP., M.Si	KASUBAG TATA USAHA	2. <i>A</i>
3	NURHIKMAWATI, S.H., MA	KASUBID PROMOSI DAN INFORMASI DAERAH	3. <i>N</i>
4	YENNY HEROWATI, SE., M.Si	KASUBID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN PEMBINA KEMASYARAKATAN	4. <i>Y</i>
5	NOVIVA DEBBY SUMAMPOUW, S.Sos., MA	KASUBID KORDINASI URUSAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN	5. <i>N</i>
6	HERLINA MONDARFA, S.AP	STAFF	6. <i>HM</i>
7	MARTHA PUTRI NINGSIH, S.Sos	STAFF	7. <i>MPN</i>
8	JUSAK TOMMY, S.Kom., MM	STAFF	8. <i>JT</i>
9	NUR SADOAH, SE., MM	STAFF	9. <i>NS</i>
10	UWEYS ALQORNEY, ST	STAFF	10. <i>U</i>
11	MASYITHA AGLINA, S.Sos	STAFF	11. <i>MA</i>
12	RUSTIYANI LAPASIRI, SH	STAFF	12. <i>R</i>
13	RANDIE ANANDA AGAM, SKM	STAFF	13. <i>R</i>
14	WINDY WIDYANINGSIH KABI, SE., MA	STAFF	14. <i>W</i>
15	SITI ROBIAH	STAFF	15. <i>S</i>
16	INDAH NOER FATIMAH	STAFF	16. <i>IF</i>
17	ADITIA MAJID	STAFF	17. <i>A</i>
18	ALIFYA REVINA PUTRI DHARMA	STAFF	18. <i>AR</i>

Mengetahui,
Kasubag Tata Usaha

IKA RAHMAWATI P, SP., M.Si
NIP. 19740109 200212 2 007



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN PENGHUBUNG

Jalan Kebon Kacang Raya No. 32 Telp. (021) 3906402
Fax. (021) 3924959 Kode Pos 10240 Email : perwakilansulteng@gmail.com
Jalan Belawan No. 15, Cideng Telp. (021) 3506116
JAKARTA

DAFTAR HADIR
RAPAT EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA TRIWULAN IV
Tanggal 06 Desember 2024

No.	Nama	Tugas	Paraf
1	JEMMY FISCHER, S.STP	KEPALA BADAN PENGHUBUNG SULAWESI	1. <i>JF</i>
2	IKA RAHMAWATI P, SP., M.Si	KASUBAG TATA USAHA	2. <i>A</i>
3	NURHIKMAWATI, S.H., MA	KASUBID PROMOSI DAN INFORMASI DAERAH	3. <i>N</i>
4	YENNY HEROWATI, SE., M.Si	KASUBID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN PEMBINA KEMASYARAKATAN	4. <i>Y</i>
5	NOVIVA DEBBY SUMAMPOUW, S.Sos., MA	KASUBID KORDINASI URUSAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN	5. <i>N</i>
6	HERLINA MONDARFA, S.AP	STAFF	6. <i>HM</i>
7	MARTHA PUTRI NINGSIH, S.Sos	STAFF	7. <i>MPN</i>
8	JUSAK TOMMY, S.Kom., MM	STAFF	8. <i>JT</i>
9	NUR SADOAH, SE., MM	STAFF	9. <i>NS</i>
10	UWEYS ALQORNEY, ST	STAFF	10. <i>U</i>
11	MASYITHA AGLINA, S.Sos	STAFF	11. <i>MA</i>
12	RUSTIYANI LAPASIRI, SH	STAFF	12. <i>R</i>
13	RANDIE ANANDA AGAM, SKM	STAFF	13. <i>R</i>
14	WINDY WIDYANINGSIH KABI, SE., MA	STAFF	14. <i>W</i>
15	SITI ROBIAH	STAFF	15. <i>S</i>
16	INDAH NOER FATIMAH	STAFF	16. <i>IF</i>
17	ADITIA MAJID	STAFF	17. <i>A</i>
18	ALIFYA REVINA PUTRI DHARMA	STAFF	18. <i>AR</i>

Mengetahui,
Kasubag Tata Usaha

IKA RAHMAWATI P, SP., M.Si
NIP. 19740109 200212 2 007



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
BADAN PENGHUBUNG

Jalan Kebon Kacang Raya No. 32 Telp. (021) 3906402
Fax. (021) 3924959 Kode Pos 10240 Email : perwakilansulteng@gmail.com
Jalan Belawan No. 15, Cideng Telp. (021) 3506116
JAKARTA

DAFTAR HADIR
RAPAT EVALUASI RENCANA AKSI KINERJA TRIWULAN I
Tanggal 05 April 2024

No.	Nama	Tugas	Paraf
1	JEMMY FISCHER, S.STP	KEPALA BADAN PENGHUBUNG SULAWESI	1. <i>JF</i>
2	IKA RAHMAWATI P, SP., M.Si	KASUBAG TATA USAHA	2. <i>A</i>
3	NURHIKMAWATI, S.H., MA	KASUBID PROMOSI DAN INFORMASI DAERAH	3. <i>N</i>
4	YENNY HEROWATI, SE., M.Si	KASUBID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA DAN PEMBINA KEMASYARAKATAN	4. <i>Y</i>
5	NOVIVA DEBBY SUMAMPOUW, S.Sos., MA	KASUBID KORDINASI URUSAN PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN	5. <i>N</i>
6	RUSTIYANI LAPASIRI, SH	STAFF	6. <i>R</i>
7	MASYITHA AGLINA, S.Sos	STAFF	7. <i>MA</i>
8	NORA, SE	STAFF	8. <i>N</i>
9	RAISA FLORENZA ELY, S.Tr.IP	STAFF	9. <i>R</i>
10	REZA PAHLEVI	STAFF	10. <i>R</i>
11	drg. NINUK AFIATI	STAFF	11. <i>NA</i>
12	MOHAMMAD AKAB, SE	STAFF	12. <i>A</i>
13	SITI ROBIAH	STAFF	13. <i>S</i>
14	ADITIA MAJID	STAFF	14. <i>A</i>
15	ALIFYA REVINA PUTRI DHARMA	STAFF	15. <i>AR</i>
16	BAYU	STAFF	16. <i>B</i>
17	INDAH NOER FATIMAH	STAFF	17. <i>IF</i>
18	MOH. RAHMAN	STAFF	18. <i>R</i>

Mengetahui,
Kasubag Tata Usaha

IKA RAHMAWATI P, SP., M.Si
NIP. 19740109 200212 2 007

Rekomendasi 3 Melakukan Pemantauan Atas Capaian Kinerja Secara Berjenjang

Screenshot e-Kinerja BKN untuk penilaian kinerja berjenjang dan penyusunan SKP



E-KINERJA
Sistem Kinerja Pegawai

Buku Panduan

MAIN MENU

- Profil
- SKP
- Tim Kerja
- Angka Kredit
- Persetujuan PKK
- Rekap Keberatan

Pengisian Bukti Dukung

Pengisian Bukti Dukung

HL RANDIE ANANDA AGAM

Kembali

SASARAN KINERJA PEGAWAI

PENGISIAN BUKTI DUKUNG UNTUK PERIODE Tahunan Final TAHUN 2025

Status SKP: PERSETUJUAN

Batas waktu pengisian evidens dan realisasi SKP untuk periode ini adalah tanggal 2025-12-31

Cetak Form Penilaian Cetak Dokumen Evaluasi Kinerja

PERIODE : Tahunan Final
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah

PERIODE PENILAIAN : 1 JANUARI SD 31 DESEMBER TAHUN 2025

Jenis Pegawai Pegawai		Model SKP JAJF		Pendidikan Kuantitatif	
NO	PEGAWAYI YANG DINILAI	NO	PEJABAT PENILAI KINERJA	Edit	Si Muka Ulang
1	NAMA RANDIE ANANDA AGAM, SKM	1	NAMA IKA RAHMAWATI PETTAOLO, SP, M.Si		
2	NIP 198812132011011003	2	NIP 197401092002122007		
3	PANGKAT / GOL. RUANG Penata / III/c	3	PANGKAT / GOL. RUANG Pembina / IV/a		
4	JABATAN PENELAHAH TEKNIK KEBUAKAAN	4	JABATAN KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA		
5	UNIT KERJA SUB BAGIAN TATA USAHA Struktur UNOR ID: Baee43a060f6dc37010f6dc7ee66102	5	UNIT KERJA SUB BAGIAN TATA USAHA Struktur UNOR ID: Baee43a060f6dc37010f6dc7ee66102		

HASIL KERJA

NO.	RENCANA HASIL KERJA PIMPINAN YANG DIINTERVENSI	RENCANA HASIL KERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA IND/MIDU	TARGET TAHUNAN	BUKTI DUKUNG	REALISASI	FEEDBACK
Utama								
Tambahan								
1	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Menyusun dokumen Rencana Kerja OPD	Kuantitas	Tersedianya dokumen Rencana Kerja (Rencana) OPD Tahun 2025	1 dokumen	Tambah REKJA 25 Edit Hapus 1 dokumen berdasarkan RENJA 2025 BADAN PENGHUBUNG		👍👎👏
			Kuantitas	Tersedianya dokumen Rencana Kerja Tahun 2025	1 dokumen	Tambah REKJA 26 Edit Hapus 1 dokumen berdasarkan RENJA 26 BADAN PENGHUBUNG		👍👎👏
			Kualitas	Dokumen rencana kerja memenuhi ketentuan sesuai peraturan yang berlaku	100%	Tambah SKP Edit Hapus 100% berdasarkan SKP RANDIE ANANDA AGAM		👍👎👏
			Waktu	Durasi pengumpulan data, penyusunan dokumen, revisi dan finalisasi	12 bulan	Tambah SKP Edit Hapus 12 bulan berdasarkan SKP RANDIE ANANDA AGAM		👍👎👏
2	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Menyusun dokumen Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon III dan IV OPD	Kuantitas	Tersedianya dokumen Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon III dan IV OPD tahun 2025	5 dokumen	Tambah PK Edit Hapus 5 DOKUMEN berdasarkan PK PEJABAT BADAN PENGHUBUNG		👍👎👏
			Kuantitas	Tersedianya dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Pejabat Eselon III dan IV tahun 2025	5 dokumen	Tambah PERUBAHAN Edit Hapus 5 DOKUMEN berdasarkan PK PERUBAHAN PEJABAT BADAN PENGHUBUNG		👍👎👏
			Kualitas	Dokumen Perjanjian Kinerja Pejabat Eselon III dan IV memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku	100%	Tambah PK Edit Hapus 100% berdasarkan PK PEJABAT BADAN PENGHUBUNG		👍👎👏
			Durasi pengumpulan informasi,		Tambah PK Edit Hapus		👍👎👏	

			Waktu	penyusunan dokumen, konsultasi, revisi dan finalisasi	12 bulan	Tambah • Hapus	12 bulan berdasarkan PK PEJABAT BADAN PENGHUBUNG	• 🏆 🏆 🏆
3	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Menyusun dokumen Survei Kepuasan Masyarakat OPD	Kuantitas	Tersedianya dokumen Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) OPD tahun 2025	2 dokumen	Tambah • SKM SEMESTER I DAN II • Edit • Hapus	2 DOKUMEN berdasarkan SKM BADAN PENGHUBUNG	• 🏆 🏆 🏆
			Kualitas	Dokumen Survei Kepuasan Masyarakat memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku	100%	Tambah • SKM SEMESTER I DAN II • Edit • Hapus	100% berdasarkan SKM BADAN PENGHUBUNG	• 🏆 🏆 🏆
			Waktu	Durasi penyusunan dokumen untuk semester I	6 bulan	Tambah • SKM SEMESTER I • Edit • Hapus	6 bulan berdasarkan SKM SEMESTER I BADAN PENGHUBUNG	• 🏆 🏆 🏆
			Waktu	Durasi penyusunan dokumen untuk semester II	6 bulan	Tambah • SKM SEMESTER II • Edit • Hapus	6 bulan berdasarkan SKM SEMESTER II BADAN PENGHUBUNG	• 🏆 🏆 🏆
4	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Menyusun dokumen Rencana Strategis OPD	Kuantitas	Tersedianya dokumen Rencana Strategis OPD Tahun 2025-2029	1 dokumen	Tambah • RENSTRA BPST 25 • Edit • Hapus	1 dokumen berdasarkan RENSTRA BPST 25	• 🏆 🏆 🏆
			Kualitas	Dokumen Rencana Strategis OPD memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku	100%	Tambah • RENSTRA BPST 25 • Edit • Hapus	1 dokumen berdasarkan https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1tIudand4PPMgorgIEH1ACs0OsLwHfcsRl	• 🏆 🏆 🏆

			Waktu	Durasi pengumpulan data, penyusunan dokumen, konsultasi, revisi dan finalisasi	12 bulan	Tambah • RENSTRA BPST 25 • Edit • Hapus	12 bulan berdasarkan RENSTRA BPST 25	• 🏆 🏆 🏆
5	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Menyusun dokumen arsitektur kinerja dan pohon kinerja OPD	Kuantitas	Tersedianya dokumen arsitektur kinerja dan pohon kinerja OPD tahun 2025	1 dokumen	Tambah • ARKIN BPST 25 • Edit • Hapus	1 dokumen berdasarkan ARKIN BPST 25	• 🏆 🏆 🏆
			Kualitas	Dokumen arsitektur kinerja dan pohon kinerja OPD sesuai ketentuan peraturan yang berlaku	100%	Tambah • ARKIN BPST 25 • Edit • Hapus	100% berdasarkan ARKIN BPST 25	• 🏆 🏆 🏆
			Waktu	Durasi pengumpulan data, penyusunan dokumen, konsultasi, revisi dan finalisasi	12 bulan	Tambah • ARKIN BPST 25 • Edit • Hapus	12 bulan berdasarkan ARKIN	• 🏆 🏆 🏆
6	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Memfasilitasi tugas-tugas lain sesuai arahan atasan	Kuantitas	Seluruh penugasan yang diberikan oleh atasan dapat dipenuhi	12 penugasan	Tambah • PENUGASAN TAMBAHAN • Edit • Hapus	12 PENUGASAN berdasarkan PENUGASAN TAMBAHAN	• 🏆 🏆 🏆
			Kualitas	Seluruh penugasan yang diberikan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku	100%	Tambah • PENUGASAN TAMBAHAN • Edit • Hapus	100% berdasarkan PENUGASAN TAMBAHAN	• 🏆 🏆 🏆
				Durasi pengerjaan		Tambah • PENUGASAN TAMBAHAN • Edit • Hapus		• 🏆 🏆 🏆

			Waktu	serta penyelesaian tugas dari atasan	12 bulan	Edit Hapus	100 12 bulan berdasarkan PENUGASAN TAMBAHAN	
RATING HASIL KINERJA: SESUAI EKSPEKTASI								
PERILAKU KERJA								
1	Berorientasi Pelayanan 1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat 2. Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan 3. Melakukan perbaikan tiada henti						Ekspektasi Khusus Pimpinan	FEEDBACK Atasan :
2	Akuntabel 1. Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab cermat disiplin dan berintegritas tinggi 2. Menggunakan kekayaan dan BMN secara bertanggung jawab efektif dan efisien 3. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan						Ekspektasi Khusus Pimpinan	FEEDBACK Atasan :
3	Kompeten 1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah 2. Membantu orang lain belajar 3. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik						Ekspektasi Khusus Pimpinan	FEEDBACK Atasan :
4	Harmonis 1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya 2. Suka menolong orang lain 3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif						Ekspektasi Khusus Pimpinan	FEEDBACK Atasan :
5	Loyal 1. Mengageng teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pada NKRI serta pemerintahan yang sah 2. Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi dan Negara 3. Menjaga rahasia jabatan dan negara						Ekspektasi Khusus Pimpinan	FEEDBACK Atasan :
6	Adaptif 1. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan 2. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas 3. Bertindak proaktif						Ekspektasi Khusus Pimpinan	FEEDBACK Atasan :
7	Kolaboratif 1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi 2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah 3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama						Ekspektasi Khusus Pimpinan	FEEDBACK Atasan :
RATING PERILAKU KERJA: SESUAI EKSPEKTASI								
PREDIKAT KINERJA: BAIK								

Rekomendasi 4 Memanfaatkan Teknologi Informasi Dalam Pengukuran Kinerja
Survei Kepuasan Masyarakat Online



Survey Kepuasan Masyarakat

Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah

Rekomendasi 5 Memberikan Informasi Tentang Keterlibatan Pimpinan Dalam Pengambilan Keputusan Strategis yang Didukung Dengan Data Dukung, Daftar Hadir, Notulensi dan Dokumentasi





Rekomendasi 6 Memastikan Bahwa di Laporan Kinerja Memuat Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Capaian Kinerja

dibandingkan dengan Sulawesi Tengah, dengan Jawa Tengah melaporkan bahwa capaian tahun 2023 melebihi target yang ditetapkan.

Perbedaan yang cukup jauh antara Badan Penghubung Daerah Sulawesi Tengah dengan kedua daerah lain di atas perlu menjadi perhatian, terutama dari sisi apa saja factor pendukung capaian kinerja yang tinggi di kedua daerah tersebut. Oleh karena itu, Badan Penghubung Daerah Sulawesi Tengah berencana akan memperkuat koordinasi dengan Badan Penghubung lain untuk dapat mendapatkan pandangan serta ide-ide *best practice* yang dapat diadopsi oleh Badan Penghubung Daerah Sulawesi Tengah ke depannya.

3.1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.

Pada tahun 2024, Badan Penghubung bertanggungjawab mengelola dua program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program Pelayanan Penghubung. Segmen ini akan secara khusus membahas tentang Program Pelayanan Penghubung dan kontribusinya terhadap pencapaian sasaran kinerja Badan Penghubung.

Sasaran kinerja Badan Penghubung Tahun 2024 ini sesuai dengan arahan arsitektur kinerja yang telah disusun di tahun 2023 yaitu **Meningkatnya pelayanan Penghubung yang prima**. Pelayanan Penghubung pada prinsipnya adalah sebagai *linson officer* sebuah organisasi, yang tugasnya adalah membangun jejaring antara organisasi asal dan organisasi mitra serta menjaga relasi baik dan mutualistic antara kedua organisasi tersebut. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 88 Tahun 2016 memiliki tugas sebagai berikut:

- Pembinaan hubungan kelembagaan antara pemerintah dan

pemerintah daerah

- Pengelolaan kegiatan informasi dan penyebarluasan informasi
- Peningkatan pembinaan hubungan kemasyarakatan Sulawesi Tengah
- Peningkatan pelayanan sarana akomodasi pemerintah daerah

Tugas di atas diadaptasi ke dalam struktur organisasi Badan Penghubung, yang terdiri atas (i) sub bagian tata usaha, (ii) sub bidang promosi dan informasi daerah, (iii) sub bidang koordinasi urusan pemerintahan dan Pembangunan, dan (iv) sub bidang hubungan antar Lembaga pemerintah dan pembinaan masyarakat. Struktur ini kemudian diadaptasi menjadi dua program, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dikelola oleh tata usaha dan Program Pelayanan Penghubung yang dikelola bersama oleh sub bidang promosi informasi, koordinasi pemerintahan serta HAL dan bimas.

Indikator kinerja untuk Program Pelayanan Penghubung merupakan adaptasi langsung dari aktivitas masing-masing sub bidang yang mengelolanya, demikian pula untuk indikator kegiatannya. Berikut adalah pembahasan mengenai kinerja masing-masing sub bidang dalam mengkontribusi capaian kinerja Badan Penghubung di tahun 2024.

A. Sub Bidang Promosi dan Informasi

Sub Bidang Promosi dan Informasi bertugas untuk memfasilitasi pelaksanaan promosi dan informasi daerah Sulawesi Tengah ke pemerintah daerah dan organisasi-organisasi lain. Salah satu aktifitas rutin dari sub bidang ini adalah partisipasi dalam



memamerkan produk-produk khas Sulawesi Tengah di berbagai perhelatan alkar. Pameran-pameran yang diikuti mulai dari skala kecil di mall-mall lokal, hingga di acara besar seperti Jakarta Fair 2024.

Permasalahan utama yang dihadapi oleh sub bidang ini adalah partisipasi perhelatan seringkali terhalang oleh biaya penyewaan booth yang terlalu tinggi, serta adanya beberapa perhelatan yang tidak berjalan dengan ideal akibat panitia perhelatan yang kurang memfasilitasi peserta pameran yang hadir.

Untuk tahun 2024, capaian kinerja sub bidang ini dapat dilihat dari Tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan promosi UKM. Berdasarkan hasil SKM, Tingkat kepuasan masyarakat atas pelayanan promosi UKM di tahun 2024 berada di 76,4 atau di atas target yang ditetapkan yaitu 75. Ini menunjukkan bahwa secara umum kepuasan masyarakat atas layanan sub bidang ini cukup baik dan sesuai dengan yang diharapkan.

B. Sub Bidang Koordinasi Urusan Pemerintahan dan Pembangunan



Sub Bidang Koordinasi Urusan Pemerintahan dan Pembangunan bertugas sebagai *linson* antara pemerintah daerah Sulawesi Tengah dengan Kementerian dan Lembaga yang berlokasi di ibu kota negara DKI Jakarta. Sub bidang ini secara rutin menerima tamu-tamu dari wilayah Sulawesi Tengah yang hendak

berkorespondensi dengan Kementerian dan Lembaga di Jakarta atau sebaliknya, dan memfasilitasi tamu-tamu tersebut mulai dari urusan administrative (penyampaian undangan, penjemputan/ pengantaran) hingga teknis (pendampingan selama pertemuan).

Tantangan utama yang dihadapi oleh sub bidang ini adalah tidak semua tamu daerah, sebelum berkorespondensi, berkoordinasi terlebih dahulu dengan Badan Penghubung. Akibatnya, Badan Penghubung seringkali tidak mengetahui bahwa ada tamu daerah yang sedang beraktivitas di lingkungan DKI Jakarta dan tidak dapat melakukan fasilitasi sesuai standar untuk tamu-tamu tersebut. Sub Bidang telah mengupayakan untuk melakukan proses jemput bola dengan secara aktif berkoordinasi dengan OPD daerah, terutama Biro-Biro di Sekretariat Daerah, untuk mendapat info mengenai jadwal dan daftar tamu yang berpotensi datang berkorespondensi di DKI Jakarta, serta memastikan bahwa proses fasilitasi korespondensi berulang didampingi dan terjadwal sebagaimana mestinya.

Untuk tahun 2024, capaian kinerja sub bidang ini tercatat memiliki Tingkat kepuasan 75,9, atau di atas target kinerja yang ditentukan yaitu 75. Nilai ini menunjukkan bahwa secara umum, Tingkat kepuasan pengguna layanan (tamu daerah, tamu K/L) cukup baik dan bahkan melebihi yang diharapkan di tahun 2024 ini. Dengan penguatan dari sisi koordinasi pembuka sebelum korespondensi antar tamu, capaian kinerja ini tentu dapat lebih ditingkatkan lagi di tahun-tahun berikutnya.

C. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Bina Masyarakat

Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Bina Masyarakat bertugas untuk membangun relasi sosial yang baik antara Badan Penghubung dengan masyarakat di wilayah DKI Jakarta, terutama masyarakat yang merupakan perantau dari wilayah Sulawesi Tengah. Sub Bidang ini secara rutin berpartisipasi

dalam memfasilitasi aktivitas-aktivitas sosial perantau Sulawesi Tengah di wilayah DKI Jakarta, serta mengelola aktivitas seni budaya di Anjungan Sulawesi Tengah di Taman Mini Indonesia Indah maupun daerah lainnya di Jabodetabek dan pulau Jawa.

Tantangan utama dari sub bidang ini dari segi penjalinan relasi masyarakat adalah masih belum adanya semacam *database* komprehensif mengenai perantau-perantau dari wilayah Sulawesi Tengah di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya serta status menetapnya (menetap sementara atau menetap penuh). Dari segi pelaksanaan pentas seni, sub bidang ini menghadapi masalah yang mirip dengan sub bidang promosi dan informasi yaitu tidak semua kegiatan pentas seni budaya dapat diikuti akibat keterbatasan anggaran. Sub bidang ini juga menghadapi isu yang sama dengan bidang koordinasi pemerintahan, yaitu tidak semua peserta pentas seni, terutama yang berangkat langsung dari wilayah Sulawesi Tengah, melakukan korespondensi dengan sub bidang ini.

Untuk Tahun 2024, sub bidang ini mencatat capaian kinerja sebesar 75,9, di atas target kinerja sebesar 75. Hal ini



menunjukkan bahwa secara umum capaian kinerja sub bidang ini juga cukup baik, terlepas dari beberapa tantangan yang dihadapi. Komunikasi proaktif dengan peserta pentas seni dan penguatan relasi sosial dengan masyarakat tentu akan dapat semakin meningkatkan capaian kinerja sub bidang ini ke depannya.

Beberapa factor pendukung capaian kinerja Badan Penghubung

tahun 2024 ini adalah sebagai berikut:

- **Partisipasi pameran/pentas seni yang rutin.** Berlokasi di daerah khusus (ibukota Jakarta membuka kesempatan Badan Penghubung untuk berpartisipasi secara rutin setiap triwulan di dalam pameran-pameran dan pentas seni, baik yang skala lokal maupun skala nasional. Selain itu, partisipasi tersebut dibarengi pula dengan keaktifan penanggung jawab pameran/pentas seni dalam mengumpulkan *feedback* dari peserta, pengisi acara maupun pengunjung pameran/pentas seni tersebut.
- **Persepsi yang baik atas kualitas pelayanan Badan Penghubung.** Badan Penghubung senantiasa mencoba meningkatkan kualitas pelayanan dan menyederhanakan proses birokrasi pelayanan yang disediakan, tanpa mengurangi akuntabilitas dari pemberian pelayanan yang dilakukan. Selain itu, petugas-petugas penyedia layanan yang secara aktif membangun komunikasi yang baik dengan semua pihak yang membutuhkan layanan, baik dari masyarakat, Kementerian/Lembaga maupun pengisi acara dan partisipan pentas seni. Upaya ini menurut kami berhasil membangun persepsi yang baik dan berdampak pada capaian kepuasan pelayanan yang baik pula dalam survey internal kami.
- **Sinergi internal yang baik antara sub bidang internal Badan Penghubung.** Seluruh sub bidang di Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah secara aktif menjaga koordinasi antara sub bidang agar pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan tercatat dengan layak. Oleh karena itu, hampir seluruh sub kegiatan di Badan Penghubung tercatat mencapai target dengan Tingkat realisasi di atas 90%.

Selain factor pendukung di atas, ada juga beberapa tantangan yang masih perlu ditanggulangi ke depannya oleh Badan Penghubung. Tantangan tersebut antara lain:

- Kepatuhan kinerja beberapa ASN yang belum baik. Salah satu contributor kurang maksimalnya penyerapan anggaran untuk pembayaran gaji (< 75%) adalah karena adanya ASN yang tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya selama berbulan-bulan dan berakibat pada penangguhan pembayaran gaji dan TFP ASN bersangkutan. Hal ini sudah diketahui dan sudah ditangani dan diharapkan ASN bersangkutan akan lebih disiplin ke depannya.
- *Visibility* Badan Penghubung. Untuk dapat memfasilitasi masyarakat dengan baik, maka Badan Penghubung perlu diketahui eksistensinya terlebih dahulu oleh masyarakat. Faktanya, masih banyak masyarakat, baik yang merantau dari Sulawesi Tengah maupun yang merupakan penduduk lokal DKI Jakarta, yang tidak mengetahui keberadaan Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Perlu dipikirkan Upaya untuk dapat meningkatkan *visibility* dari Badan Penghubung Daerah agar lebih banyak masyarakat yang dapat mengakses layanan Badan Penghubung.
- Reformulasi komponen indeks kepuasan masyarakat. Sesuai dengan arsitektur kinerja Badan Penghubung 2024 yang sudah disusun, indikator program dan kegiatan, yang juga berfungsi sebagai komponen perhitungan indeks kepuasan masyarakat Badan Penghubung, mengalami perubahan. Perubahan ini mengakibatkan adanya kelompok baru yang perlu dihitung dalam formulasi indeks kepuasan, yang pada akhirnya berdampak pada angka capaian yang tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya.
- Pengisian survey kepuasan masyarakat belum maksimal. Survei kepuasan masyarakat merupakan alat untuk menghitung indeks kepuasan masyarakat, oleh karena itu seharusnya setiap aktivitas Badan Penghubung selalu dibarengi dengan pengisian survey kepuasan masyarakat. Namun demikian, masih ditemukan kendala saat pelaksanaan

survey kepuasan masyarakat mulai dari kendala jaringan nirkabel yang mengakibatkan form survey tidak bisa dibuka, kurang sigapnya petugas pengumpul survey selama kegiatan berlangsung hingga penolakan pengisian oleh beberapa partisipan kegiatan.

3.1.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
Informasi tentang efisiensi penggunaan sumber daya Badan Penghubung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.5
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Badan Penghubung Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah
Tahun 2024

No	Tipe/Barang	Indikator Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Y	R	R	Y	R	R	
1	Uang/kegiatan Pelayanan Penghubung yang prima	10	14,10	95,25	10.394.333.590	14.320.471.888	10,13	6,50

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa untuk tahun 2024, Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mencatat efisiensi sebesar 6,50. Secara rinci, dengan realisasi anggaran sebesar 88,75% dari total anggaran tahun 2024, Badan Penghubung berhasil mencatat capaian kinerja sebesar 95,25%, atau ada selisih positif sebesar 6,50%. Selisih positif ini menunjukkan bahwa Badan Penghubung Daerah dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan tanpa harus memanfaatkan seluruh anggaran yang telah dialokasikan. Efisiensi ini secara kolektif dimungkinkan karena beberapa factor. Pertama adalah persepsi positif pelayanan Badan Penghubung Daerah. Berdasarkan hasil SKM Badan Penghubung tahun 2024, Tingkat kepuasan untuk semua komponen SKM (yang merupakan adaptasi dari jenis layanan yang disediakan di Badan Penghubung Daerah). Tingkat kepuasan Masyarakat seluruhnya berada di atas target yaitu lebih dari skor 75.

Rekomendasi 7 Menindaklanjuti Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Dengan Membuat Berita Acara LHE APIP Sesuai Peraturan Perundang-undangan



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
INSPEKTORAT DAERAH
JALAN DEWTA SARTIKA NO. 47 TELP (0451) 488152 – 488034
Kode Pos 94114 PALU

BERITA ACARA
PEMBAHASAN TINDAKLANJUT HASIL EVALUASI AKIP TAHUN 2024
PADA BADAN PENGHUBUNG DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Empat Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, tim tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun 2024 Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam melaksanakan tugas berdasarkan Surat Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor : 800.1.11.1/244/IRWIL.III/ITDA tanggal 10 Juli 2025, melakukan pembahasan dengan Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dengan susunan tim :

NO	NAMA	NIP	JABATAN
1.	Drs.M. Muchlis, MM.	19710222 199012 1 001	Penanggung Jawab
2.	Ajo Rizal, SH., M.Si.	19701210 199803 1 012	Wakil Penanggung jawab
3.	Ret Karnasih, SE, MM	19792310 200211 2 001	Supervisor
4.	Sahrul, S. Sos, MM	19810828 200801 1 003	Ketua Tim
5.	Deddy, S.A.P	19821226 201001 1 002	Anggota Tim

Pada akhir pembahasan dari tindak lanjut rekomendasi laporan hasil evaluasi AKIP tahun 2024 pada Badan Penghubung Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024, Nomor : 700.1.2.1/033/LHE-AKIP/PROV/IRBAN3/2025 tanggal 21 Mei 2025, terdapat rekomendasi sebanyak 7 (tujuh), yaitu :

1. Rekomendasi (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) telah ditindaklanjuti.

Matrik tindak lanjut hasil evaluasi AKIP Badan Penghubung Daerah, sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat sebenar benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Penghubung Daerah
Kepala Badan
Provinsi Sulawesi Tengah
Jalan Setra
Palu
Jatmy Fischer, S.STP
NIP. 19770104 199612 1 001

Palu, Juli 2025
Tim Tindak lanjut
Supervisor,
Ret Karnasih, SE., MM
NIP. 19792310 200211 2 001

Ketua Tim,
Sahrul, S. Sos, MM
NIP. 19810828 200801 1 003

Anggota Tim
Deddy, S.A.P
NIP. 19821226 201001 1 002

Mengetahui :
Inspektur Pembantu Wilayah III
Ajo Rizal, SH., M.Si
NIP. 19701210 199803 1 012